

**IMPLEMENTATION OF SIPD IN REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT: EVIDENCE FROM
MURUNG RAYA REGENCY**

Oleh

MAXIMILIANUS ADITIA HERSADJATI
NIM : 2540503120005

JURNAL ILMIAH

Untuk memperoleh gelar Magister
Program Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Konsentrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
2026

**IMPLEMENTATION OF SIPD IN REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT: EVIDENCE FROM MURUNG RAYA REGENCY**

Oleh

**MAXIMILIANUS ADITIA HERSADJATI
NIM : 2540503120005**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk memperoleh gelar Magister

Program Magister Ilmu Ekonomi

Bidang Konsentrasi Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTATION OF SIPD IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: EVIDENCE FROM MURUNG RAYA REGENCY

Oleh

MAXIMILIANUS ADITIA HERSADJATI

NIM : 2540503120005

JURNAL ILMIAH

Untuk memperoleh gelar Magister
Prodi Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Konsentrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Palangka Raya, Juli 2026

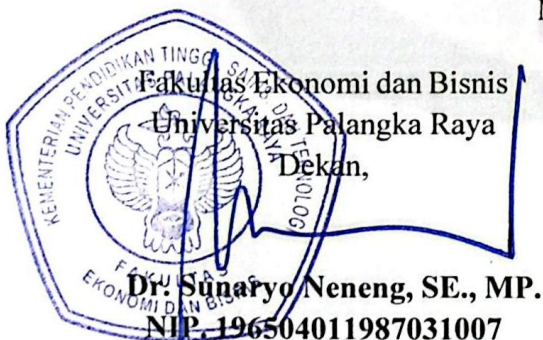
PEMBIMBING I


Dr. Wiwin Zakiah, SE, MP
NIP. 197207311997022002

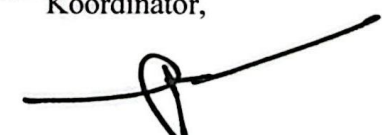
PEMBIMBING II


Drs. Benius, MM., Ph.D.
NIP. 196508311990031006

Mengetahui,


Dr. Sunaryo Neneng, SE., MP.
NIP. 196504011987031007

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Koordinator,


Drs. Benius, MM., Ph.D.
NIP. 196508311990031006

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTATION OF SIPD IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: EVIDENCE FROM MURUNG RAYA REGENCY

Jurnal Ilmiah ini diajukan oleh :

Nama : Maximilianus Aditia Hersadjati

NIM : 2540503120005

Prodi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penilai dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

DEWAN PENILAI

Nama Lengkap:

Tanda Tangan:

Pembimbing 1 : **Dr. Wiwin Zakiah, SE, MP.**

Pembimbing 2 : **Drs. Benius, MM., Ph.D.**

Penguji : **Dr. Sunaryo Neneng, SE., MP.**

Ditetapkan di : Palangka Raya

Tanggal : Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, jurnal ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Palangka Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sanksi Karya Ilmiah dan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palangka Raya, Juli 2026



Maximilianus Aditia Hersadjati
NIM. 2540503120005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada ALLAH SWT Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hikmatnya sehingga dapat diselesaikannya Jurnal Ilmiah yang berjudul ***“Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency”***. Jurnal Ilmiah ini diajukan sebagai dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister pada Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Palangka Raya Prof. Dr. Salampak Dohong, MS atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister di Universitas Palangka Raya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya sekaligus Dosen Penilai yang telah memberikan saran dan masukan di penulisan Artikel Tugas Akhir penulis Dr. Sunaryo Neneng, SE., MP.
3. Drs. Benius, MM., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya Sekaligus dosen pembimbing II Penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan pendalaman materi, pemahaman sistematika dan metode penelitian;
4. Dr. Wiwin Zakiah, SE., MP selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan pendalaman materi, pemahaman sistematika dan metode penelitian.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya;
6. Istri dan Anak-anak saya serta keluarga besar saya., Orang yang pantang menyerah dalam memberikan doa dan dukungan di setiap Langkah perjalanan penulis dalam proses penyusunan Artikel Ilmiah ini;
7. Efi Susanti, S.Pd., M.Pd. Staf di Program Magister Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu penulis di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut serta dan membantu dalam penyelesaian penulisan Artikel Ilmiah Ini, terima kasih atas segalanya;

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar Jurnal Ilmiah ini dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, Juli 2026



MAXIMILIANUS ADITIA HERSADJATI

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRACT	1
BAB I Introduction.....	2
BAB II Literature Review.....	5
BAB III Research Method	9
BAB IV Result & Discussion.....	11
BAB V Conclusion.....	22
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	13
TABEL 2.....	14
TABEL 3.....	14
TABEL 4.....	15
TABEL 5.....	16
TABEL 6.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar/<i>Figure</i> 1.....	12
------------------------------------	-----------

IMPLEMENTATION OF SIPD IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: EVIDENCE FROM MURUNG RAYA REGENCY

By:

1. Maximilianus Aditia Hersadjati

Masters Program in Economics, Faculty of Economics and Business, University of Palangka Raya

2. Wiwin Zakiah

Faculty of Economics and Business, University of Palangka Raya

3. Benius

Faculty of Economics and Business, University of Palangka Raya

DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4462>

Abstract

This study aims to analyze the application of the regional government information system in enhancing the effectiveness and efficiency of financial management and administration. The regional government information system is a national digital system designed to integrate the entire regional financial cycle from planning, budgeting, execution, and reporting to evaluation. Using a mixed methods approach, this research combines quantitative analysis of regional budget, budget realization reports, and regional government information system metadata with qualitative analysis through interviews, observations, and questionnaires based on the DeLone & McLean model. The findings indicate that regional government information system implementation significantly contributes to improving expenditure realization accuracy, consistency between planning and budgeting documents, and reporting efficiency. The average user perception score for system quality reached 4.2, with performance impact rated very good (4.4). However, technical challenges such as server instability and limited digital human resources remain barriers to optimal implementation. This research reinforces the relevance of Musgrave's theory on fiscal allocation efficiency and the DeLone & McLean model in evaluating public information systems.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Local Government, Regional Financial Management, Regional Government Information System.

I. INTRODUCTION

Regional financial management and administration are crucial elements in realizing transparent, accountable, and efficient governance (Wardani & Hasibuan, 2024). In practice, many local governments in Indonesia still face serious challenges, such as delays in financial reporting, mismatches between planning and budgeting, and weak integration between information systems (Gamayuni, 2020; Septiani & Isnawaty, 2024). Data fragmentation and protracted manual processes often lead to fiscal inefficiency and poor decision-making quality (Rahmadany, 2023).

In response to these challenges, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia developed the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintah Daerah/SIPD), an integrated digital platform covering the entire regional financial management cycle from planning and budgeting to implementation and reporting (Tanan et al., 2024). SIPD is expected to be a strategic solution to strengthen synergy between regional government agencies, improve data accuracy, and accelerate national financial administration processes (Salain & Wedena, 2023; Teken & Romarina, 2024). However, despite widespread implementation of SIPD, its effectiveness in improving the quality of regional financial management has not received much academic study. There remains a gap between the system's potential and its actual benefits, particularly regarding human resource readiness, digital infrastructure, and institutional adaptation.

In addition, SIPD has become a mandatory platform for all regional governments through regulations issued by the Ministry of Home Affairs in 2021, making its successful implementation a national priority in realizing digital governance and fiscal reform (Nangoy et al., 2025). Audit reports from the Audit Board of Indonesia (Badan Pengawas Keuangan/BPK) and national monitoring by Kemendagri indicate that several

regions continue to experience technical downtime, incomplete data migration, and disparities in user capability, suggesting that the benefits of SIPD are not yet evenly distributed (Septiani & Isnawaty, 2024). However, empirical evaluation of its real impacts remains limited, with most previous studies focusing on conceptual analyses or case discussions without measuring quantifiable administrative improvements. The selection of Murung Raya Regency as the research site strengthens the relevance of this study because it represents regions with complex geographic characteristics and infrastructure variability, providing an opportunity to examine SIPD performance in a realistic and challenging implementation environment.

Musgrave (1959) emphasized that a public financial system must be able to carry out its allocation, distribution, and stabilization functions efficiently. In the context of information systems, the DeLone and McLean (2003) model states that the success of a system is determined by the quality of information, systems, services, and their impact on organizational performance. Robinson and Brumby (2005) shows that digitalization of public budgets can improve efficiency and accountability, but only if supported by institutional reforms and technical capacity.

The identified gap is the lack of empirical studies that directly measure the contribution of the regional government information system to increasing the effectiveness and efficiency of regional financial management, especially in the context of Indonesia, which has diverse capacities between regions. The problem formulation in this study is: How does the application of SIPD contribute to increasing the effectiveness of regional financial management and administration in Murung Raya Regency? What are the supporting and inhibiting factors for implementation of SIPD at the regional level? The aims of this study are to analyze the impact of the implementation of the regional government information system on the quality of regional financial management, identify challenges, strategies, and recommendations for optimizing SIPD within an institutional

and technical context. This research offers a novel empirical evaluation of SIPD, a national system that has not been widely studied in the academic literature. Its main contributions are: providing scientific evidence on the effectiveness of SIPD in improving regional fiscal governance; developing an evaluation framework based on information systems models and public finance theory; and providing relevant policy recommendations for central and regional governments in strengthening the digitalization of public finance.

II. LITERATURE REVIEW

Regional Government Information System

Information systems such as SIPD serve as instruments for realizing these principles through the digitization of planning, budgeting, implementation, and reporting processes (Pinontoan et al., 2025). The success of regional government information system implementation can be analyzed using an information systems model. DeLone and McLean (2003) developed an information systems evaluation model encompassing six dimensions: system quality, information quality, service quality, usability, user satisfaction, and net benefits. This model is relevant for assessing how regional government information system impacts regional financial management performance. In his study of e-Government, Heeks (2006) stated that digital transformation in government depends not only on technology but also on organizational readiness, bureaucratic culture, and human resource capacity.

SIPD, as a national system, must be implemented with an adaptive approach to local conditions. SIPD supports this by providing a real-time reporting platform, integration between work units, and public access to budget data. SIPD is designed to integrate the Regional Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), Regional Work Unit Strategic Plan (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra SKPD), and Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA) into one system, thereby supporting performance-based budgeting. SIPD, as a digital system, enables regional government organizations to adapt to demands for transparency and efficiency through process automation and integration. SIPD provides financial performance indicators and output-based reporting that support internal control. In Indonesia, SIPD replaced the previous systems with a cloud-based approach and national integration, making it a strategic innovation in regional financial

reform. Strengthening regional financial information systems as key to improving the quality of public spending (World Bank Group, 2020). Regional government information system addresses this recommendation by providing a platform that supports data-driven planning and standardized reporting.

Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management

Regional financial management constitutes a critical component of public finance, with the primary objective of ensuring the efficient, equitable, and sustainable allocation of resources to meet societal needs. Musgrave (1959), in his theory of public finance, identifies three core functions of public finance, allocation, distribution, and stabilization, each of which plays a distinct role in achieving fiscal objectives. In the context of regional governance, the allocation function assumes particular importance, as it directly influences the effectiveness of public expenditure and the overall efficiency of budget utilization. To support these goals, regional financial management must be guided by fundamental principles of good governance, namely transparency, accountability, efficiency, and effectiveness (Mardiasmo, 2009; Masdar et al., 2021; Bakhtiar, 2021). These principles not only enhance public trust but also serve as benchmarks for evaluating the performance of regional fiscal systems.

From an organizational perspective, the effectiveness and efficiency of regional financial management can be further understood through established theories of organizational performance. Steers (1977) argues that organizational effectiveness is determined by three interrelated dimensions: the degree of goal attainment, the capacity to adapt to external environmental changes, and the level of internal operational efficiency. In the realm of public financial administration, these dimensions translate into the ability of regional governments to align budgetary processes with development priorities, respond promptly to fiscal challenges, and optimize resource utilization. Complementing this view, Anthony and Govindarajan (2007) emphasize that the

effectiveness of a management control system hinges on the organization's capability to systematically measure, monitor, and evaluate performance against predefined objectives. Recent studies have reinforced this perspective, highlighting the critical role of robust control mechanisms in improving accountability and decision-making quality in regional financial management (Saputra et al., 2024). These theoretical foundations underscore that the success of regional financial systems depends not only on technical tools and procedures but also on strong organizational capacity, adaptive governance structures, and continuous performance evaluation.

International Practices, Relevance of the Regional Government Information System

International experiences in public financial management have consistently demonstrated that fiscal accountability and efficient resource use are significantly enhanced through the adoption of performance-based budgeting systems coupled with high levels of information transparency. Schick (1998) argues that such systems enable governments to shift from traditional input-oriented budgeting toward outcome-focused approaches, thereby fostering greater accountability to citizens and oversight institutions. Similarly, Allen and Tommasi (2001), in their comprehensive framework for managing public expenditure, emphasize that an effective financial information system must establish clear linkages between budget inputs, service delivery processes, and measurable development outputs and outcomes. Empirical evidence from various countries further corroborates these principles: the implementation of technology-driven budgeting and financial management systems has been shown to improve fiscal efficiency, reduce leakages, and reinforce public accountability by providing real-time data access and standardized reporting mechanisms (Robinson & Brumby, 2005; Chen et al., 2022; Majer & Makuac, 2023). These global practices highlight the strategic importance of digital financial platforms in modernizing public finance administration and aligning fiscal policy with development priorities.

In the Indonesian context, SIPD draws directly from these established international principles and represents a localized application of advanced public financial management concepts. By integrating planning, budgeting, execution, reporting, and evaluation processes into a unified digital platform, SIPD aligns closely with the theoretical foundations of performance-based budgeting, transparency, and outcomeoriented financial governance articulated in the international literature. In doing so, the research not only contributes to the growing body of knowledge on digital transformation in public finance but also advances the development of evaluation frameworks for performance-based financial information systems, while offering practical insights into institutional adaptation strategies required for successful implementation in diverse regional settings (Nur et al., 2023).

III. RESEARCH METHODS

This research uses a mixed methods approach. The method is a combination of quantitative and qualitative descriptive approaches (Taguchi, 2018). This approach was chosen to obtain a comprehensive picture of SIPD implementation, both in terms of financial data and the perceptions and experiences of system users. A quantitative approach was used to analyze budget realization data, reporting speed, and consistency of financial documents before and after the implementation of SIPD. A qualitative approach was used to explore perceptions, challenges, and strategies for implementing SIPD through interviews and observations. The research was conducted in the local government of Murung Raya Regency, which represents a diverse geographic region with high complexity and dynamic institutional capacity. This study's subjects included regional financial management officials, SIPD operators and technical staff, internal and external auditors, and documentation of the 2020–2024 Regional Budget and Budget Realization Report (Laporan Realisasi Anggaran/LRA).

This study employed both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through semi-structured interviews, questionnaires, and direct observation of SIPD usage across regional government offices. Secondary data consisted of APBD documents, Budget Realization Reports financial performance reports, and SIPD data provided by the Ministry of Home Affairs. Data were collected using several techniques, including in-depth interviews with 15 key informants in each OPD, closed and open questionnaires based on the DeLone and McLean model to measure system quality and user satisfaction, documentation review of financial reports, and direct observation of the input, validation, and reporting processes within SIPD.

The analysis used a mixed-methods approach that combined quantitative and qualitative techniques. Quantitative analysis included descriptive statistics to evaluate SIPD effectiveness in improving reporting speed, data accuracy, and document consistency, paired t-tests to compare financial performance indicators before and after SIPD implementation, and Likert scoring to measure user perceptions of system and information quality. Qualitative analysis was conducted through thematic examination of interview results to identify perceptions, implementation challenges, and strategic responses, supported by data triangulation between interviews, observations, and document studies to enhance validity.

To support the analysis, the study applied the DeLone and McLean (2003) information system success model to assess six dimensions of SIPD performance, along with Musgrave's fiscal theory (1959) to evaluate SIPD's role in allocation and efficiency functions. Data processing utilized SPSS for statistical analysis, NVivo for qualitative coding, and Microsoft Excel for financial and budget data management.

IV. RESULT AND DISCUSSION

IV.I RESULTS

Implementation of SIPD on Regional Financial Management

SIPD is a national digital-based system developed by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia to support integrated regional governance. SIPD serves as the primary platform for regional financial planning, budgeting, implementation, reporting, and evaluation, as well as asset management and institutional profiles. The SIPD is designed to enhance the efficiency and effectiveness of regional financial management by providing real-time data to support decision-making, strengthening transparency and accountability, and integrating information systems across government units (Pesireron & Kriekhoff, 2025). Its main components include a Planning and Budgeting module that manages documents such as the Regional Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), Strategic Plans of Local Government Work Units, Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA), and Budget Implementation Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), enabling vertical and horizontal alignment between planning and budgeting processes. The public financial governance module covers budget execution, Fund Disbursement Order (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D) processing, and expenditure realization, supporting reporting based on outputs and outcomes. Additionally, the Regional Property Finance (Barang Milik Daerah/BMD) module facilitates digital asset management and provides real-time information on asset values, locations, and conditions.

The SIPD operates through an integrated national cloud platform managed by the Ministry of Home Affairs, enabling a bidirectional flow of information. Local governments enter and retrieve data through the SIPD dashboard, while the central government performs validation, monitoring, and technical support. The data processed through SIPD is then utilized for the preparation of financial reports, performance evaluations, and both internal and external audits. SIPD is a relevant locus for this research because its implementation has been mandatory for all local governments since 2021, providing structured quantitative and qualitative data suitable for systematic analysis. As a representation of digital transformation in public financial management, SIPD serves as a key instrument for evaluating regional fiscal performance and institutional effectiveness. Figure 1 shows the focus of the regional government information system, which consists of planning and budgeting, public financial management, and regional assets finance.

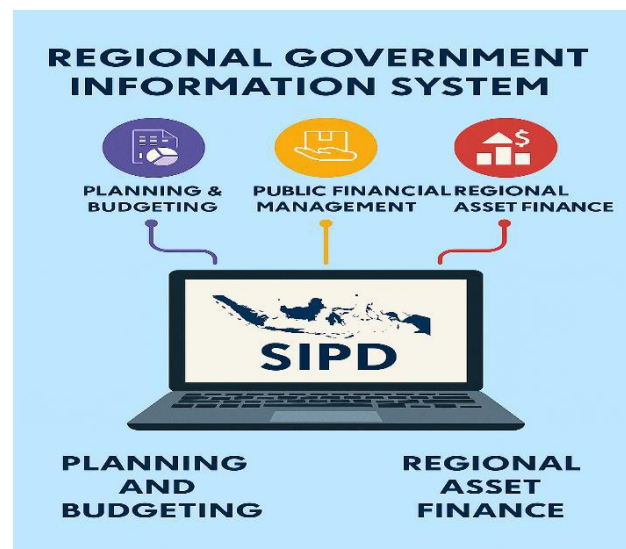


Figure 1. Regional Government Information System (SIPD)

Primary data was obtained through the results of semi-structured interviews with 15 key informants from five Regional Government Work Units

(Organisasi Perangkat Daerah/OPD) consisting of Regional Financial and Asset Management Agency (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) officials, SIPD operators, internal auditors, and planning staff; a Likert scale-based questionnaire (1–5) to measure perceptions of system quality, ease of use, and the impact of SIPD on work efficiency; as well as direct observation of the RKA input process, expenditure validation, and LRA reporting through the SIPD dashboard. The findings showed that the majority of informants acknowledged that SIPD accelerated the reporting process and increased data accuracy, but still faced technical obstacles such as server disruptions and limited digital human resources. Table 1 shows the primary data recapitulation.

Table 1. Primary Data Recapitulation

Data source	Observed Indicators	Key Findings
Interview	Perception of SIPD effectiveness	87% of informants stated that SIPD increased the accuracy and speed of reporting.
	Technical and HR constraints	73% cited server outages and lack of training as major barriers.
Questionnaire	Quality of the SIPD system	Average score 4.2 out of 5 (good category)
	SIPD user satisfaction	Average score 4.0 out of 5 (quite satisfied category)
Observation	RKA input and validation process	Monitored faster and documented digitally
	LRA reporting via the SIPD dashboard	Budget realization can be monitored daily and across OPDs

Secondary data were collected from official documents of local governments and the Ministry of Home Affairs, including: 2020–2024 Regional Budget and Revised Regional Budget Documents, Quarterly and Annual Budget Realization Reports, Regional Financial Performance Reports and Metadata and Manual for Using SIPD from the Directorate General of Regional Financial Development.

The data show that since the implementation of SIPD, consistency between planning and budgeting documents has increased, and the time required to prepare financial reports has decreased by an average of 30–40%. Table 2 shows the secondary data recapitulations.

Table 2. Secondary Data Recapitulation

Document Type	Year	Key Findings
Regional Budget & Revised Regional Budget	2020–2024	Consistency between RKA and DPA has increased since SIPD was implemented
Realization Report	2020–2024	Report preparation time is reduced by $\pm 35\%$ compared to manual systems
Performance Report	2020–2024	Financial performance indicators are more integrated with SIPD
SIPD Metadata	2023	Demonstrates realization tracking, automatic validation, and RPJMD integration features.

The document review presented in Table 2 shows notable improvements in regional financial management following the implementation of SIPD. Regional Budget and Revised Regional Budget documents from 2020–2024 indicate increased consistency between RKA and DPA, reflecting stronger alignment in planning and budgeting. Realization reports for the same period show that preparation time has decreased by approximately 35% compared to manual processes, demonstrating enhanced efficiency. Performance reports from 2020–2024 reveal better integration of financial performance indicators within SIPD. Additionally, SIPD metadata from 2023 highlights key system capabilities, including realization tracking, automatic validation, and integration with RPJMD.

Descriptive statistics are used to describe trends and distributions of quantitative data from financial documents and SIPD. Table 3 shows the SIPD quantitative data. The financial performance indicators showed by LRA preparation time, RKA-DPA consistency, and accuracy from spending realization.

Table 3. SIPD Quantitative Data

Financial Performance Indicators	Before SIPD (2019)	After SIPD (2024)	Change (%)
LRA preparation time	45 days	28 days	–37.8%
RKA–DPA Consistency	72%	94%	+22%
Accuracy of spending realization	85%	96%	+11%

According to Table 3, the data shows that after the implementation of SIPD, the time required to prepare the Budget Realization Report decreased from 45 days to 28 days (a 37.8% decrease). Consistency between the RKA and DPA increased from 72% to 94%, and the accuracy of expenditure realization increased from 85% to 96%. It concludes that SIPD significantly contributes to increased reporting efficiency and budget document consistency. The accuracy of spending realization increases due to automated system validation.

The paired t-test, a difference analysis was performed to examine whether there were statistically significant changes in regional financial performance before and after the implementation of SIPD. The test evaluated three key performance variables, namely report preparation time, realization accuracy, and document consistency. These indicators were selected to measure the extent to which SIPD contributed to improvements in the effectiveness and reliability of financial management processes. The results of the paired t-test are presented in Table 4.

Table 4. Paired T-test

Test	Value
T-statistic	4.21
P-Value	0.003 ($p < 0.05$)

The results of the difference test show a t-statistic = 4.21 and p-value = 0.003 ($p < 0.05$), which means there is a significant difference between financial performance before and after SIPD. There is a statistically significant difference between financial performance before and after SIPD. This indicates that SIPD has a positive impact on the efficiency and effectiveness of regional financial administration.

A Likert scoring approach was applied to analyze user perceptions collected through the SIPD user perception questionnaire. The instrument utilized a 1–5 scale to assess responses related to system quality and user satisfaction, where higher scores indicate more positive evaluations. The results of the Likert scoring, which summarize user perceptions of SIPD performance, are presented in Table 5.

Table 5. Data SIPD User Perception Questionnaire

SIPD Evaluation Dimensions	Average Score	Category
System quality	4.2	Good
Ease of use	4.0	Pretty good
Reporting speed	4.3	Good
User satisfaction	4.0	Quite satisfied
Benefits to performance	4.4	Very good

Table 5 summarizes the results of the SIPD user perception questionnaire, indicating generally positive assessments across all evaluation dimensions. System quality received an average score of 4.2, categorized as good, while ease of use and user satisfaction scored 4.0, reflecting perceptions that the system is reasonably easy to operate and provides a satisfactory user experience. Reporting speed was rated 4.3, indicating good performance in supporting faster financial reporting. The highest rating was given to the perceived benefits to performance, with a score of 4.4, categorized as very good, demonstrating that users acknowledge SIPD’s strong contribution to improving work effectiveness and organizational performance. It can be concluded that SIPD users rate this system as high quality and useful, although there is still room for improvement in terms of technical ease and service support (Khairunnisa & Setyowati, 2024).

The thematic analysis of the semi-structured interviews with 15 key informants. The interview results revealed four key themes related to SIPD implementation, namely the effectiveness of SIPD in supporting reporting processes, technical challenges associated with server and network reliability, the

need for improved human resource capacity and training, and the role of SIPD in enhancing integration across OPDs. These themes emerged consistently across participants and provide insight into both the strengths and constraints of system implementation in regional financial management.

Challenges, Strategies, and Recommendations for Optimizing SIPD

The first theme highlighted the perceived effectiveness of SIPD in improving reporting processes. One BPKAD informant stated that SIPD really helps compile reports more quickly and accurately, underscoring the system's contribution to enhancing efficiency. Additionally, the system was seen as strengthening collaboration across agencies, as expressed by a Regional Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda) planner who noted that SIPD makes inter-agency programs more synchronized. These statements reflect a strong perception that SIPD has positively influenced reporting performance and institutional integration. At the same time, informants identified several challenges that constrain optimal implementation. Technical issues were particularly emphasized, with an SIPD operator pointing out that the server often goes down when inputting RKA, especially at the beginning of the budget year, indicating system instability during peak workloads. Human resource readiness also emerged as a key concern, illustrated by an internal auditor who stated that there are still many staff who are not yet familiar with digital systems. Collectively, these representative statements demonstrate that although SIPD is viewed as effective, its success is closely dependent on technical reliability and sufficient user capability.

Triangulation was applied to strengthen the validity of the research findings by comparing information obtained from interviews, direct observations, and secondary financial documents. This approach made it possible to cross-

check the consistency of evidence and identify the convergence between qualitative and quantitative data related to SIPD implementation. Table 6 presents the comparative results of the triangulated data.

Table 6. Comparative Data

Data source	Consistent Findings	Validation of Findings
Interview	SIPD speeds up reporting	Confirmed by LRA data (37.8% time reduction)
Observation	Faster and documented shopping validation	In accordance with SIPD metadata and BPK reports
LRA Document	Realization accuracy increases	According to user perception (score 4.4)

The triangulation results presented in the table indicate a strong alignment across the three data sources. Interview data confirmed that SIPD accelerates reporting processes, a finding supported quantitatively by a 37.8% reduction in preparation time recorded in the LRA. Observational data also demonstrated faster and well-documented expenditure validation, which is consistent with SIPD metadata and audit evidence from BPK. Meanwhile, LRA documents revealed increased accuracy in realization reporting, further reinforced by user perception survey results, which showed a score of 4.4 for perceived performance benefits. Collectively, these consistent findings validate each other and emphasize that SIPD contributes to improving reporting speed, accuracy, and transparency, thereby strengthening the credibility of the research results.

IV.II DISCUSSION

The implementation of the SIPD has been proven to have a positive impact on regional financial management. Reduced reporting times, increased document consistency, and accuracy of spending realization demonstrate that SIPD supports administrative efficiency and effectiveness. However, technical challenges such as server outages and limited digital human resources remain

major obstacles (Mendriadi et al., 2025). The DeLone and McLean model shows that users rate the quality of the SIPD system and information well, but service and technical support need improvement. Musgrave's theory of fiscal allocation efficiency is also reflected in the increase in more targeted and documented spending.

The results show that the time to prepare the LRA was reduced from 45 days to 28 days after the implementation of SIPD (a 37.8% decrease). The reduction in reporting time indicates that SIPD has successfully automated previously manual and fragmented financial administration processes. This aligns with the DeLone and McLean (2003) model, where system quality and ease of use directly contribute to operational efficiency. SIPD enables real-time input of realization data, automatic validation, and integration between work units, thereby accelerating the reporting cycle. From the perspective of Allen's Managing Public Expenditure theory and Tommasi (2001), reporting time efficiency is an indicator of the success of the financial information system in supporting timely fiscal decision-making.

The consistency between RKA and DPA increased from 72% to 94%. Document consistency demonstrates SIPD's ability to integrate planning and budgeting processes within a single platform. Previously, discrepancies between the RKA and DPA frequently occurred due to format differences, input delays, and manual revisions. SIPD systematically synchronizes the RPJMD, Renstra SKPD, and RKA, thereby reducing the risk of inconsistencies. According to Musgrave (1959), consistent and targeted budget allocation is a key requirement for fiscal efficiency. SIPD supports the allocation function by providing a uniform and documented data structure.

The Accuracy of spending realization increased from 85% to 96%. Improved spending accuracy demonstrates that SIPD strengthens internal control mechanisms and transaction validation. This system enables daily budget realization tracking, account code locking, and automatic notification of deviations (Faisal, 2025). This minimizes the opportunity for input errors and data manipulation (Meliana & Ansar, 2021). In the context of fiscal accountability spending accuracy is a crucial indicator in assessing the integrity of the regional financial system (Schick, 1998; Loozekot & Dijkstra, 2017). SIPD supports the principles of transparency and auditability through traceable digital footprints.

User perceptions of SIPD system quality show generally positive results, with an average score of 4.2 for system quality, 4.0 for ease of use, and 4.4 for performance benefits. These findings indicate that SIPD is well-received and viewed as a reliable platform that supports efficient work processes. Users particularly appreciate its reliability, fast access, and intuitive navigation features, which contribute to improved reporting performance (Nasrudin & Widagdo, 2020). However, despite the positive assessment, challenges remain related to technical stability and user competence, since many civil servants are still adapting to digital workflows. In line with the DeLone and McLean Information System Success Model, user satisfaction and performance benefits are influenced by the quality of systems and information. SIPD already fulfills most of these dimensions, yet the results suggest that strengthening technical support and providing continuous training are necessary to maximize system effectiveness.

One of the key supporting factors in the regional implementation of SIPD is demonstrated through data triangulation, which reveals strong consistency between user perceptions, field observations, and official financial documents.

Data triangulation indicates that the research findings have high validity. User perceptions of the effectiveness of SIPD align with quantitative data and official documents (Bernika et al., 2023). Direct observation of the input and reporting processes strengthens the evidence that SIPD improves efficiency and accuracy (Kofahe et al., 2019; Gohary, 2019). This supports a mixed methods approach in public policy research, where the integration of primary and secondary data provides a more complete and in-depth picture.

A major inhibiting factor in the implementation of SIPD at the regional level relates to human resource capacity and system infrastructure (Andhayani & Eltivina, 2022). The findings show that 73% of informants identified frequent server disruptions and insufficient training as primary obstacles. Technical constraints such as server outages and network limitations, particularly in 3T (remote, frontier, and outermost) areas, hamper SIPD optimization. Furthermore, resistance to change from civil servants accustomed to manual systems presents a challenge. The success of e-Government depends not only on technology but also on organizational readiness and bureaucratic culture (Manoe et al., 2023). SIPD needs to be balanced with change management strategies, intensive training, and strengthening of digital infrastructure (Kerwayu & Patty, 2025).

V. CONCLUSION

Based on the analysis of primary and secondary data through descriptive statistics, difference testing, Likert scoring, thematic analysis, and data triangulation, the implementation of SIPD has demonstrated a substantial contribution to improving the effectiveness and efficiency of regional financial management in Indonesia. The system has accelerated financial reporting, enhanced the accuracy of budget realization, and strengthened the consistency of planning and budgeting documents, evidenced by a 37.8% reduction in LRA preparation time and an increase in RKA–DPA consistency from 72% to 94%. User perception results also indicate strong acceptance, with average scores above four for system quality, ease of use, and performance benefits. Despite these positive outcomes, SIPD implementation continues to face significant challenges related to limited digital skills, unstable system infrastructure, and bureaucratic resistance to technological change, indicating that long-term success requires strengthened institutional capacity and ongoing technical support. This study strengthens the relevance of the DeLone and McLean model in evaluating government information systems and confirms the fiscal allocation function in Musgrave’s theory as the foundation for efficient public budget management. SIPD has met most of the dimensions of information system success but still requires strengthening in terms of technical services and local adaptation.

The results of this study show that SIPD implementation has significantly improved the effectiveness and efficiency of regional financial management, particularly by accelerating reporting processes, increasing document consistency, and enhancing spending accuracy; however, technical constraints and limited digital human resources remain major challenges. These findings imply that strengthening ICT infrastructure, expanding user training, and improving technical support are critical to maximizing system performance. Nonetheless, the study has limitations, as it focuses on a single

regional government (Murung Raya Regency), relies on a limited sample of interview informants, and does not analyze system performance logs directly, which may limit generalizability. Future research should expand to comparative studies across multiple regions, apply longitudinal analysis to assess long-term effects, examine cost–benefit implications, and explore change management and digital competency strategies to better support sustainable SIPD implementation and enhance public value outcomes.

REFERENCE

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. Paris: OECD Publishing.
- Andhayani, A., & Eltivia, N. (2022). The effect of implementation of the regional government information system (SIPD) on regional financial transparency in local governments. *Judicious*, 3(2), 364–369.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management control systems* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230-245.
- Bancin, M. R. H., Lubis, T. A., Juanda, R. A., & Sari, E. N. (2024). Implementation and effectiveness of local government information systems (sipd) in Indonesia: A Literature Study. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(1), 1901-1919.
- Bernika, F., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2023). Implementation and implications of regional government information system (SIPD) on expenditure administration. *Accounting and Finance Studies*, 3(3), 229-238.
- Chen, Y., Hao, S., & Li, A. (2022). Do governmental, technological and organizational factors influence the performance of financial management systems?. *Kybernetes*, 51(3), 1127-1150.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Faisal, H. (2025). Data and information center planning: the role of SIPD RI in achieving effective and transparent governance. *International Journal of Arts and Social Science*, 8(3), 26-39.
- Gamayuni, R. R. (2020). Implementation of e-planning, e-budgeting and government internal control systems for financial reporting quality at local governments in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 112-124.
- Gohary, E. E. (2019). The impact of financial technology on facilitating e-government services in Egypt. *Journal of Distribution Science*, 17(5), 51-59.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. California: Sage Publications.
- Kerwayu, A. P., & Patty, T. F. Q. (2025). Implementation of regional government information system in improving regional financial management at the office of the regional financial and asset management agency of Sikka Regency. *ICEBA*, 1(1), 14-30.

- Khairunnisa, P., & Setyowati, M. S. (2024). Analysis of factors influencing user satisfaction with the benefits of the information system in the SIPD-SIKD application of the special capital region of Jakarta. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(1), 98-116.
- Kofahe, M. K., Hassan, H., & Mohamad, R. (2019). Factors affecting successful implementation of government financial management information system (GFMIS) in Jordan public sector: A proposed framework. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(20), 32-44.
- Loozekoot, A., & Dijkstra, G. (2017). Public accountability and the public expenditure and financial accountability tool: an assessment. *International Review of Administrative Sciences*, 83(4), 806-825.
- Majer, C. G., & Makuac, L. J. A. (2023). Analysis of strategic public financial management reforms on effective service delivery. *International Journal of Business and Social Science Research*, 4(3-4), 1-10.
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (sipd) bidang anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi Teknologi*, 9(1), 23-25.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, 21(3), 66-68.
- Meliana, M., & Ansar, R. (2021). Utilization of information technology and Organizational commitment to the reliability of financial statements with internal control moderation. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 38-44.
- Mendriadi, L. S., Widnyani, I. A. P. S., & Dewi, N. D. U. (2025). The effectiveness of the implementation of SIPD in efforts to support financial administration in Buleleng Regency government. *Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era*, 7(1), 377-383.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nangoy, N. A. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2025). Analysis of the implementation and implications of the regional government information system (SIPD) in regional financial management (Study in North Sulawesi Province). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 4(1), 2936.
- Nasrudin, E., & Widagdo, A. K. (2020). Determinan kepuasan pengguna sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengaruhnya terhadap individu dan organisasi. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 69-94.

- Nur, F., Budi, S., & Endar, P. (2023). Effectiveness of regional financial management with the regional government information system (sipd) as the intervening variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 93-103.
- Pesireron, S., & Kriekhoff, S. (2025). Local government information system (SIPD) as a moderation; the effect of budget participation on the performance of regional apparatus organizations (opd) of maluku province government. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1), 535544.
- Pinontoan, V. R., Pangkey, I., & Mamonto, F. H. (2025). Effectiveness of the regional government information system (SIPD) implemented in the general affairs section of the regional secretariat of North Minahasa Regency. *International Journal of Information Technology and Education*, 4(3), 47-57.
- Rahmadany, A. F. (2023). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209.
- Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does performance budgeting work? An analytical review of the empirical literature. *IMF Working Paper*, 5(210), 101-115.
- Salain, P. P. P., & Wedana, I. K. J. (2023). Penerapan aplikasi sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) dalam pelaksanaan laporan keuangan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Senema)*, 2(1), 453-458.
- Saputra, A., Setiawan, A. B., & Jamaludin, A. (2024). The effect of the government internal control system on the performance of government agencies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5), 781-790.
- Schick, A. (1998). Why most developing countries should not try New Zealand's reforms. *World Bank Research Observer*, 13(1), 123–131.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. *Administrative science quarterly*, 46-56.
- Taguchi, N. (2018). Description and explanation of pragmatic development: Quantitative, qualitative, and mixed methods research. *System*, 75(1), 23-32.
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123.

Wardani, E. K., & Hasibuan, D. (2024). The impact of financial report quality and performance-based budget implementation on the accountability performance of government agencies with accounting control as a moderator: empirical study of regional government work units in Bogor City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(4), 471-482.

World Bank Group (2020). Indonesia public expenditure review: Spending for better results. World Bank Group. Retrieved on September 30, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditurereview>

Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

*Implementation of
SIPD on Financial
Management*

Maximilianus Aditya Hersadjati
Universitas Palangka Raya; Palangka Raya, Indonesia
E-Mail: maximilianus.a.h@gmail.com

1675

Irawan
Universitas Palangka Raya; Palangka Raya, Indonesia

Benius
Universitas Palangka Raya; Palangka Raya, Indonesia

Submitted:
OCTOBER 2025

Accepted:
DECEMBER 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the regional government information system in enhancing the effectiveness and efficiency of financial management and administration. The regional government information system is a national digital system designed to integrate the entire regional financial cycle from planning, budgeting, execution, and reporting to evaluation. Using a mixed methods approach, this research combines quantitative analysis of regional budget, budget realization reports, and regional government information system metadata with qualitative analysis through interviews, observations, and questionnaires based on the DeLone & McLean model. The findings indicate that regional government information system implementation significantly contributes to improving expenditure realization accuracy, consistency between planning and budgeting documents, and reporting efficiency. The average user perception score for system quality reached 4.2, with performance impact rated very good (4.4). However, technical challenges such as server instability and limited digital human resources remain barriers to optimal implementation. This research reinforces the relevance of Musgrave's theory on fiscal allocation efficiency and the DeLone & McLean model in evaluating public information systems.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Local Government, Regional Financial Management, Regional Government Information System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta administrasi keuangan. Sistem informasi pemerintah daerah merupakan sistem digital nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data APBD, laporan realisasi anggaran dan metadata sistem informasi pemerintah daerah dengan analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, serta kuesioner berbasis model DeLone & McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintah daerah secara signifikan berkontribusi pada peningkatan akurasi realisasi belanja, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta efisiensi pelaporan. Rata-rata skor persepsi pengguna terhadap kualitas sistem mencapai 4.2, dengan dampak kinerja dinilai sangat baik (4.4). Namun demikian, tantangan teknis seperti ketidakstabilan server dan keterbatasan sumber daya manusia digital masih menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Penelitian ini

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 13 No. 6, 2025
pp. 1675-1688
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v13i6.4462

menegaskan relevansi teori Musgrave mengenai efisiensi alokasi fiskal dan model DeLone & McLean dalam evaluasi sistem informasi sektor publik.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pemerintah Daerah, Manajemen Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

INTRODUCTION

Regional financial management and administration are crucial elements in realizing transparent, accountable, and efficient governance (Wardani & Hasibuan, 2024). In practice, many local governments in Indonesia still face serious challenges, such as delays in financial reporting, mismatches between planning and budgeting, and weak integration between information systems (Gamayuni, 2020; Septiani & Isnawaty, 2024). Data fragmentation and protracted manual processes often lead to fiscal inefficiency and poor decision-making quality (Rahmadany, 2023).

In response to these challenges, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia developed the Regional Government Information System (*Sistem Informasi Pemerintah Daerah*/SIPD), an integrated digital platform covering the entire regional financial management cycle from planning and budgeting to implementation and reporting (Tanan et al., 2024). SIPD is expected to be a strategic solution to strengthen synergy between regional government agencies, improve data accuracy, and accelerate national financial administration processes (Salain & Wedena, 2023; Teken & Romarina, 2024). However, despite widespread implementation of SIPD, its effectiveness in improving the quality of regional financial management has not received much academic study. There remains a gap between the system's potential and its actual benefits, particularly regarding human resource readiness, digital infrastructure, and institutional adaptation.

In addition, SIPD has become a mandatory platform for all regional governments through regulations issued by the Ministry of Home Affairs in 2021, making its successful implementation a national priority in realizing digital governance and fiscal reform (Nangoy et al., 2025). Audit reports from the Audit Board of Indonesia (*Badan Pengawas Keuangan*/BPK) and national monitoring by Kemendagri indicate that several regions continue to experience technical downtime, incomplete data migration, and disparities in user capability, suggesting that the benefits of SIPD are not yet evenly distributed (Septiani & Isnawaty, 2024). However, empirical evaluation of its real impacts remains limited, with most previous studies focusing on conceptual analyses or case discussions without measuring quantifiable administrative improvements. The selection of Murung Raya Regency as the research site strengthens the relevance of this study because it represents regions with complex geographic characteristics and infrastructure variability, providing an opportunity to examine SIPD performance in a realistic and challenging implementation environment.

Musgrave (1959) emphasized that a public financial system must be able to carry out its allocation, distribution, and stabilization functions efficiently. In the context of information systems, the DeLone and McLean (2003) model states that the success of a system is determined by the quality of information, systems, services, and their impact on organizational performance. Robinson and Brumby (2005) shows that digitalization of public budgets can improve efficiency and accountability, but only if supported by institutional reforms and technical capacity.

The identified gap is the lack of empirical studies that directly measure the contribution of the regional government information system to increasing the effectiveness and efficiency of regional financial management, especially in the context of Indonesia, which has diverse capacities between regions. The problem formulation in this study is: How does the application of SIPD contribute to increasing the effectiveness of regional financial management and administration in Murung Raya Regency? What are the supporting and inhibiting factors for implementation of SIPD at the regional level? The

aims of this study are to analyze the impact of the implementation of the regional government information system on the quality of regional financial management, identify challenges, strategies, and recommendations for optimizing SIPD within an institutional and technical context. This research offers a novel empirical evaluation of SIPD, a national system that has not been widely studied in the academic literature. Its main contributions are: providing scientific evidence on the effectiveness of SIPD in improving regional fiscal governance; developing an evaluation framework based on information systems models and public finance theory; and providing relevant policy recommendations for central and regional governments in strengthening the digitalization of public finance.

LITERATURE REVIEW

Regional Government Information System

Information systems such as SIPD serve as instruments for realizing these principles through the digitization of planning, budgeting, implementation, and reporting processes (Pinontoan et al., 2025). The success of regional government information system implementation can be analyzed using an information systems model. DeLone and McLean (2003) developed an information systems evaluation model encompassing six dimensions: system quality, information quality, service quality, usability, user satisfaction, and net benefits. This model is relevant for assessing how regional government information system impacts regional financial management performance. In his study of e-Government, Heeks (2006) stated that digital transformation in government depends not only on technology but also on organizational readiness, bureaucratic culture, and human resource capacity.

SIPD, as a national system, must be implemented with an adaptive approach to local conditions. SIPD supports this by providing a real-time reporting platform, integration between work units, and public access to budget data. SIPD is designed to integrate the Regional Medium-Term Development Plan (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD*), Regional Work Unit Strategic Plan (*Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra SKPD*), and Work Plan and Budget (*Rencana Kerja dan Anggaran/RKA*) into one system, thereby supporting performance-based budgeting. SIPD, as a digital system, enables regional government organizations to adapt to demands for transparency and efficiency through process automation and integration. SIPD provides financial performance indicators and output-based reporting that support internal control. In Indonesia, SIPD replaced the previous systems with a cloud-based approach and national integration, making it a strategic innovation in regional financial reform. Strengthening regional financial information systems as key to improving the quality of public spending (World Bank Group, 2020). Regional government information system addresses this recommendation by providing a platform that supports data-driven planning and standardized reporting.

Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management

Regional financial management constitutes a critical component of public finance, with the primary objective of ensuring the efficient, equitable, and sustainable allocation of resources to meet societal needs. Musgrave (1959), in his theory of public finance, identifies three core functions of public finance, allocation, distribution, and stabilization, each of which plays a distinct role in achieving fiscal objectives. In the context of regional governance, the allocation function assumes particular importance, as it directly influences the effectiveness of public expenditure and the overall efficiency of budget utilization. To support these goals, regional financial management must be guided by fundamental principles of good governance, namely transparency, accountability, efficiency, and effectiveness (Mardiasmo, 2009; Masdar et al., 2021; Bakhtiar, 2021). These principles not only enhance public trust but also serve as benchmarks for evaluating the performance of regional fiscal systems.

From an organizational perspective, the effectiveness and efficiency of regional financial management can be further understood through established theories of organizational performance. Steers (1977) argues that organizational effectiveness is determined by three interrelated dimensions: the degree of goal attainment, the capacity to adapt to external environmental changes, and the level of internal operational efficiency. In the realm of public financial administration, these dimensions translate into the ability of regional governments to align budgetary processes with development priorities, respond promptly to fiscal challenges, and optimize resource utilization. Complementing this view, Anthony and Govindarajan (2007) emphasize that the effectiveness of a management control system hinges on the organization's capability to systematically measure, monitor, and evaluate performance against predefined objectives. Recent studies have reinforced this perspective, highlighting the critical role of robust control mechanisms in improving accountability and decision-making quality in regional financial management (Saputra et al., 2024). These theoretical foundations underscore that the success of regional financial systems depends not only on technical tools and procedures but also on strong organizational capacity, adaptive governance structures, and continuous performance evaluation.

International Practices, Relevance of the Regional Government Information System

International experiences in public financial management have consistently demonstrated that fiscal accountability and efficient resource use are significantly enhanced through the adoption of performance-based budgeting systems coupled with high levels of information transparency. Schick (1998) argues that such systems enable governments to shift from traditional input-oriented budgeting toward outcome-focused approaches, thereby fostering greater accountability to citizens and oversight institutions. Similarly, Allen and Tommasi (2001), in their comprehensive framework for managing public expenditure, emphasize that an effective financial information system must establish clear linkages between budget inputs, service delivery processes, and measurable development outputs and outcomes. Empirical evidence from various countries further corroborates these principles: the implementation of technology-driven budgeting and financial management systems has been shown to improve fiscal efficiency, reduce leakages, and reinforce public accountability by providing real-time data access and standardized reporting mechanisms (Robinson & Brumby, 2005; Chen et al., 2022; Majer & Makuac, 2023). These global practices highlight the strategic importance of digital financial platforms in modernizing public finance administration and aligning fiscal policy with development priorities.

In the Indonesian context, SIPD draws directly from these established international principles and represents a localized application of advanced public financial management concepts. By integrating planning, budgeting, execution, reporting, and evaluation processes into a unified digital platform, SIPD aligns closely with the theoretical foundations of performance-based budgeting, transparency, and outcome-oriented financial governance articulated in the international literature. In doing so, the research not only contributes to the growing body of knowledge on digital transformation in public finance but also advances the development of evaluation frameworks for performance-based financial information systems, while offering practical insights into institutional adaptation strategies required for successful implementation in diverse regional settings (Nur et al., 2023).

RESEARCH METHODS

This research uses a mixed methods approach. The method is a combination of quantitative and qualitative descriptive approaches (Taguchi, 2018). This approach was chosen to obtain a comprehensive picture of SIPD implementation, both in terms of financial data and the perceptions and experiences of system users. A quantitative approach was used to analyze budget realization data, reporting speed, and consistency of financial documents before and after the implementation of SIPD. A qualitative

approach was used to explore perceptions, challenges, and strategies for implementing SIPD through interviews and observations. The research was conducted in the local government of Murung Raya Regency, which represents a diverse geographic region with high complexity and dynamic institutional capacity. This study's subjects included regional financial management officials, SIPD operators and technical staff, internal and external auditors, and documentation of the 2020–2024 Regional Budget and Budget Realization Report (*Laporan Realisasi Anggaran/LRA*).

This study employed both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through semi-structured interviews, questionnaires, and direct observation of SIPD usage across regional government offices. Secondary data consisted of APBD documents, Budget Realization Reports financial performance reports, and SIPD data provided by the Ministry of Home Affairs. Data were collected using several techniques, including in-depth interviews with 15 key informants in each OPD, closed and open questionnaires based on the DeLone and McLean model to measure system quality and user satisfaction, documentation review of financial reports, and direct observation of the input, validation, and reporting processes within SIPD.

The analysis used a mixed-methods approach that combined quantitative and qualitative techniques. Quantitative analysis included descriptive statistics to evaluate SIPD effectiveness in improving reporting speed, data accuracy, and document consistency, paired t-tests to compare financial performance indicators before and after SIPD implementation, and Likert scoring to measure user perceptions of system and information quality. Qualitative analysis was conducted through thematic examination of interview results to identify perceptions, implementation challenges, and strategic responses, supported by data triangulation between interviews, observations, and document studies to enhance validity.

To support the analysis, the study applied the DeLone and McLean (2003) information system success model to assess six dimensions of SIPD performance, along with Musgrave's fiscal theory (1959) to evaluate SIPD's role in allocation and efficiency functions. Data processing utilized SPSS for statistical analysis, NVivo for qualitative coding, and Microsoft Excel for financial and budget data management.

RESULTS

Implementation of SIPD on Regional Financial Management

SIPD is a national digital-based system developed by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia to support integrated regional governance. SIPD serves as the primary platform for regional financial planning, budgeting, implementation, reporting, and evaluation, as well as asset management and institutional profiles. The SIPD is designed to enhance the efficiency and effectiveness of regional financial management by providing real-time data to support decision-making, strengthening transparency and accountability, and integrating information systems across government units (Pesireron & Kriekhoff, 2025). Its main components include a Planning and Budgeting module that manages documents such as the Regional Medium-Term Development Plan (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD*), Strategic Plans of Local Government Work Units, Work Plan and Budget (*Rencana Kerja dan Anggaran/RKA*), and Budget Implementation Document (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA*), enabling vertical and horizontal alignment between planning and budgeting processes. The public financial governance module covers budget execution, Fund Disbursement Order (*Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D*) processing, and expenditure realization, supporting reporting based on outputs and outcomes. Additionally, the Regional Property Finance (*Barang Milik Daerah/BMD*) module facilitates digital asset management and provides real-time information on asset values, locations, and conditions.

The SIPD operates through an integrated national cloud platform managed by the Ministry of Home Affairs, enabling a bidirectional flow of information. Local governments enter and retrieve data through the SIPD dashboard, while the central

government performs validation, monitoring, and technical support. The data processed through SIPD is then utilized for the preparation of financial reports, performance evaluations, and both internal and external audits. SIPD is a relevant locus for this research because its implementation has been mandatory for all local governments since 2021, providing structured quantitative and qualitative data suitable for systematic analysis. As a representation of digital transformation in public financial management, SIPD serves as a key instrument for evaluating regional fiscal performance and institutional effectiveness. Figure 1 shows the focus of the regional government information system, which consists of planning and budgeting, public financial management, public financial management, and regional assets finance.



Figure 1. Regional Government Information System (SIPD)

Primary data was obtained through the results of semi-structured interviews with 15 key informants from five Regional Government Work Units (*Organisasi Perangkat Daerah/OPD*) consisting of Regional Financial and Asset Management Agency (*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD*) officials, SIPD operators, internal auditors, and planning staff; a Likert scale-based questionnaire (1–5) to measure perceptions of system quality, ease of use, and the impact of SIPD on work efficiency; as well as direct observation of the RKA input process, expenditure validation, and LRA reporting through the SIPD dashboard. The findings showed that the majority of informants acknowledged that SIPD accelerated the reporting process and increased data accuracy, but still faced technical obstacles such as server disruptions and limited digital human resources. Table 1 shows the primary data recapitulation.

Table 1. Primary Data Recapitulation		
Data source	Observed Indicators	Key Findings
Interview	Perception of SIPD effectiveness	87% of informants stated that SIPD increased the accuracy and speed of reporting.
	Technical and HR constraints	73% cited server outages and lack of training as major barriers.
Questionnaire	Quality of the SIPD system	Average score 4.2 out of 5 (good category)
	SIPD user satisfaction	Average score 4.0 out of 5 (quite satisfied category)
Observation	RKA input and validation process	Monitored faster and documented digitally
	LRA reporting via the SIPD dashboard	Budget realization can be monitored daily and across OPDs

Secondary data were collected from official documents of local governments and the Ministry of Home Affairs, including: 2020–2024 Regional Budget and Revised Regional Budget Documents, Quarterly and Annual Budget Realization Reports, Regional Financial Performance Reports and Metadata and Manual for Using SIPD from the Directorate General of Regional Financial Development.

The data show that since the implementation of SIPD, consistency between planning and budgeting documents has increased, and the time required to prepare financial reports has decreased by an average of 30–40%. Table 2 shows the secondary data recapitulations.

Table 2. Secondary Data Recapitulation

Document Type	Year	Key Findings
Regional Budget & Revised Regional Budget	2020–2024	Consistency between RKA and DPA has increased since SIPD was implemented
Realization Report	2020–2024	Report preparation time is reduced by $\pm 35\%$ compared to manual systems
Performance Report	2020–2024	Financial performance indicators are more integrated with SIPD
SIPD Metadata	2023	Demonstrates realization tracking, automatic validation, and RPJMD integration features.

The document review presented in Table 2 shows notable improvements in regional financial management following the implementation of SIPD. Regional Budget and Revised Regional Budget documents from 2020–2024 indicate increased consistency between RKA and DPA, reflecting stronger alignment in planning and budgeting. Realization reports for the same period show that preparation time has decreased by approximately 35% compared to manual processes, demonstrating enhanced efficiency. Performance reports from 2020–2024 reveal better integration of financial performance indicators within SIPD. Additionally, SIPD metadata from 2023 highlights key system capabilities, including realization tracking, automatic validation, and integration with RPJMD.

Descriptive statistics are used to describe trends and distributions of quantitative data from financial documents and SIPD. Table 3 shows the SIPD quantitative data. The financial performance indicators showed by LRA preparation time, RKA-DPA consistency, and accuracy from spending realization.

Table 3. SIPD Quantitative Data

Financial Performance Indicators	Before SIPD (2019)	After SIPD (2024)	Change (%)
LRA preparation time	45 days	28 days	–37.8%
RKA–DPA Consistency	72%	94%	+22%
Accuracy of spending realization	85%	96%	+11%

According to Table 3, the data shows that after the implementation of SIPD, the time required to prepare the Budget Realization Report decreased from 45 days to 28 days (a 37.8% decrease). Consistency between the RKA and DPA increased from 72% to 94%, and the accuracy of expenditure realization increased from 85% to 96%. It concludes that SIPD significantly contributes to increased reporting efficiency and budget document consistency. The accuracy of spending realization increases due to automated system validation.

The paired t-test, a difference analysis was performed to examine whether there were statistically significant changes in regional financial performance before and after the implementation of SIPD. The test evaluated three key performance variables, namely report preparation time, realization accuracy, and document consistency. These indicators were selected to measure the extent to which SIPD contributed to improvements in the effectiveness and reliability of financial management processes. The results of the paired t-test are presented in Table 4.

Table 4. Paired T-test

Test	Value
T-statistic	4.21
P-Value	0.003 (p < 0.05)

The results of the difference test show a t-statistic = 4.21 and p-value = 0.003 (p < 0.05), which means there is a significant difference between financial performance before and after SIPD. There is a statistically significant difference between financial performance before and after SIPD. This indicates that SIPD has a positive impact on the efficiency and effectiveness of regional financial administration.

A Likert scoring approach was applied to analyze user perceptions collected through the SIPD user perception questionnaire. The instrument utilized a 1–5 scale to assess responses related to system quality and user satisfaction, where higher scores indicate more positive evaluations. The results of the Likert scoring, which summarize user perceptions of SIPD performance, are presented in Table 5.

Table 5. Data SIPD User Perception Questionnaire

SIPD Evaluation Dimensions	Average Score	Category
System quality	4.2	Good
Ease of use	4.0	Pretty good
Reporting speed	4.3	Good
User satisfaction	4.0	Quite satisfied
Benefits to performance	4.4	Very good

Table 5 summarizes the results of the SIPD user perception questionnaire, indicating generally positive assessments across all evaluation dimensions. System quality received an average score of 4.2, categorized as good, while ease of use and user satisfaction scored 4.0, reflecting perceptions that the system is reasonably easy to operate and provides a satisfactory user experience. Reporting speed was rated 4.3, indicating good performance in supporting faster financial reporting. The highest rating was given to the perceived benefits to performance, with a score of 4.4, categorized as very good, demonstrating that users acknowledge SIPD’s strong contribution to improving work effectiveness and organizational performance. It can be concluded that SIPD users rate this system as high quality and useful, although there is still room for improvement in terms of technical ease and service support (Khairunnisa & Setyowati, 2024).

The thematic analysis of the semi-structured interviews with 15 key informants. The interview results revealed four key themes related to SIPD implementation, namely the effectiveness of SIPD in supporting reporting processes, technical challenges associated with server and network reliability, the need for improved human resource capacity and training, and the role of SIPD in enhancing integration across OPDs. These themes emerged consistently across participants and provide insight into both the strengths and constraints of system implementation in regional financial management.

Challenges, Strategies, and Recommendations for Optimizing SIPD

The first theme highlighted the perceived effectiveness of SIPD in improving reporting processes. One BPKAD informant stated that SIPD really helps compile reports more quickly and accurately, underscoring the system’s contribution to enhancing efficiency. Additionally, the system was seen as strengthening collaboration across agencies, as expressed by a Regional Development Planning Agency (*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda*) planner who noted that SIPD makes inter-agency programs more synchronized. These statements reflect a strong perception that SIPD has positively influenced reporting performance and institutional integration.

At the same time, informants identified several challenges that constrain optimal implementation. Technical issues were particularly emphasized, with an SIPD operator pointing out that the server often goes down when inputting RKA, especially at the beginning of the budget year, indicating system instability during peak workloads. Human

resource readiness also emerged as a key concern, illustrated by an internal auditor who stated that there are still many staff who are not yet familiar with digital systems. Collectively, these representative statements demonstrate that although SIPD is viewed as effective, its success is closely dependent on technical reliability and sufficient user capability.

Triangulation was applied to strengthen the validity of the research findings by comparing information obtained from interviews, direct observations, and secondary financial documents. This approach made it possible to cross-check the consistency of evidence and identify the convergence between qualitative and quantitative data related to SIPD implementation. Table 6 presents the comparative results of the triangulated data.

Table 6. Comparative Data

Data source	Consistent Findings	Validation of Findings
Interview	SIPD speeds up reporting	Confirmed by LRA data (37.8% time reduction)
Observation	Faster and documented shopping validation	In accordance with SIPD metadata and BPK reports
LRA Document	Realization accuracy increases	According to user perception (score 4.4)

The triangulation results presented in the table indicate a strong alignment across the three data sources. Interview data confirmed that SIPD accelerates reporting processes, a finding supported quantitatively by a 37.8% reduction in preparation time recorded in the LRA. Observational data also demonstrated faster and well-documented expenditure validation, which is consistent with SIPD metadata and audit evidence from BPK. Meanwhile, LRA documents revealed increased accuracy in realization reporting, further reinforced by user perception survey results, which showed a score of 4.4 for perceived performance benefits. Collectively, these consistent findings validate each other and emphasize that SIPD contributes to improving reporting speed, accuracy, and transparency, thereby strengthening the credibility of the research results.

DISCUSSION

The implementation of the SIPD has been proven to have a positive impact on regional financial management. Reduced reporting times, increased document consistency, and accuracy of spending realization demonstrate that SIPD supports administrative efficiency and effectiveness. However, technical challenges such as server outages and limited digital human resources remain major obstacles (Mendriadi et al., 2025). The DeLone and McLean model shows that users rate the quality of the SIPD system and information well, but service and technical support need improvement. Musgrave's theory of fiscal allocation efficiency is also reflected in the increase in more targeted and documented spending.

The results show that the time to prepare the LRA was reduced from 45 days to 28 days after the implementation of SIPD (a 37.8% decrease). The reduction in reporting time indicates that SIPD has successfully automated previously manual and fragmented financial administration processes. This aligns with the DeLone and McLean (2003) model, where system quality and ease of use directly contribute to operational efficiency. SIPD enables real-time input of realization data, automatic validation, and integration between work units, thereby accelerating the reporting cycle. From the perspective of Allen's Managing Public Expenditure theory and Tommasi (2001), reporting time efficiency is an indicator of the success of the financial information system in supporting timely fiscal decision-making.

The consistency between RKA and DPA increased from 72% to 94%. Document consistency demonstrates SIPD's ability to integrate planning and budgeting processes within a single platform. Previously, discrepancies between the RKA and DPA frequently occurred due to format differences, input delays, and manual revisions. SIPD

systematically synchronizes the RPJMD, Renstra SKPD, and RKA, thereby reducing the risk of inconsistencies. According to Musgrave (1959), consistent and targeted budget allocation is a key requirement for fiscal efficiency. SIPD supports the allocation function by providing a uniform and documented data structure.

The Accuracy of spending realization increased from 85% to 96%. Improved spending accuracy demonstrates that SIPD strengthens internal control mechanisms and transaction validation. This system enables daily budget realization tracking, account code locking, and automatic notification of deviations (Faisal, 2025). This minimizes the opportunity for input errors and data manipulation (Meliana & Ansar, 2021). In the context of fiscal accountability spending accuracy is a crucial indicator in assessing the integrity of the regional financial system (Schick, 1998; Loozekot & Dijkstra, 2017). SIPD supports the principles of transparency and auditability through traceable digital footprints.

User perceptions of SIPD system quality show generally positive results, with an average score of 4.2 for system quality, 4.0 for ease of use, and 4.4 for performance benefits. These findings indicate that SIPD is well-received and viewed as a reliable platform that supports efficient work processes. Users particularly appreciate its reliability, fast access, and intuitive navigation features, which contribute to improved reporting performance (Nasrudin & Widagdo, 2020). However, despite the positive assessment, challenges remain related to technical stability and user competence, since many civil servants are still adapting to digital workflows. In line with the DeLone and McLean Information System Success Model, user satisfaction and performance benefits are influenced by the quality of systems and information. SIPD already fulfills most of these dimensions, yet the results suggest that strengthening technical support and providing continuous training are necessary to maximize system effectiveness.

One of the key supporting factors in the regional implementation of SIPD is demonstrated through data triangulation, which reveals strong consistency between user perceptions, field observations, and official financial documents. Data triangulation indicates that the research findings have high validity. User perceptions of the effectiveness of SIPD align with quantitative data and official documents (Bernika et al., 2023). Direct observation of the input and reporting processes strengthens the evidence that SIPD improves efficiency and accuracy (Kofahe et al., 2019; Gohary, 2019). This supports a mixed methods approach in public policy research, where the integration of primary and secondary data provides a more complete and in-depth picture.

A major inhibiting factor in the implementation of SIPD at the regional level relates to human resource capacity and system infrastructure (Andhayani & Eltivia, 2022). The findings show that 73% of informants identified frequent server disruptions and insufficient training as primary obstacles. Technical constraints such as server outages and network limitations, particularly in 3T (remote, frontier, and outermost) areas, hamper SIPD optimization. Furthermore, resistance to change from civil servants accustomed to manual systems presents a challenge. The success of e-Government depends not only on technology but also on organizational readiness and bureaucratic culture (Manoe et al., 2023). SIPD needs to be balanced with change management strategies, intensive training, and strengthening of digital infrastructure (Kerwayu & Patty, 2025).

CONCLUSION

Based on the analysis of primary and secondary data through descriptive statistics, difference testing, Likert scoring, thematic analysis, and data triangulation, the implementation of SIPD has demonstrated a substantial contribution to improving the effectiveness and efficiency of regional financial management in Indonesia. The system has accelerated financial reporting, enhanced the accuracy of budget realization, and strengthened the consistency of planning and budgeting documents, evidenced by a 37.8% reduction in LRA preparation time and an increase in RKA–DPA consistency from 72% to 94%. User perception results also indicate strong acceptance, with average scores above four for system quality, ease of use, and performance benefits. Despite these positive

outcomes, SIPD implementation continues to face significant challenges related to limited digital skills, unstable system infrastructure, and bureaucratic resistance to technological change, indicating that long-term success requires strengthened institutional capacity and ongoing technical support. This study strengthens the relevance of the DeLone and McLean model in evaluating government information systems and confirms the fiscal allocation function in Musgrave's theory as the foundation for efficient public budget management. SIPD has met most of the dimensions of information system success but still requires strengthening in terms of technical services and local adaptation.

The results of this study show that SIPD implementation has significantly improved the effectiveness and efficiency of regional financial management, particularly by accelerating reporting processes, increasing document consistency, and enhancing spending accuracy; however, technical constraints and limited digital human resources remain major challenges. These findings imply that strengthening ICT infrastructure, expanding user training, and improving technical support are critical to maximizing system performance. Nonetheless, the study has limitations, as it focuses on a single regional government (Murung Raya Regency), relies on a limited sample of interview informants, and does not analyze system performance logs directly, which may limit generalizability. Future research should expand to comparative studies across multiple regions, apply longitudinal analysis to assess long-term effects, examine cost-benefit implications, and explore change management and digital competency strategies to better support sustainable SIPD implementation and enhance public value outcomes.

REFERENCES

- [1] Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. Paris: OECD Publishing.
- [2] Andhayani, A., & Eltivia, N. (2022). The effect of implementation of the regional government information system (SIPD) on regional financial transparency in local governments. *Judicious*, 3(2), 364-369.
- [3] Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management control systems* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [4] Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230-245.
- [5] Bancin, M. R. H., Lubis, T. A., Juanda, R. A., & Sari, E. N. (2024). Implementation and effectiveness of local government information systems (sipd) in Indonesia: A Literature Study. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(1), 1901-1919.
- [6] Bernika, F., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2023). Implementation and implications of regional government information system (SIPD) on expenditure administration. *Accounting and Finance Studies*, 3(3), 229-238.
- [7] Chen, Y., Hao, S., & Li, A. (2022). Do governmental, technological and organizational factors influence the performance of financial management systems?. *Kybernetes*, 51(3), 1127-1150.
- [8] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30.
- [9] Faisal, H. (2025). Data and information center planning: the role of SIPD RI in achieving effective and transparent governance. *International Journal of Arts and Social Science*, 8(3), 26-39.
- [10] Gamayuni, R. R. (2020). Implementation of e-planning, e-budgeting and government internal control systems for financial reporting quality at local governments in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 112-124.
- [11] Gohary, E. E. (2019). The impact of financial technology on facilitating e-government services in Egypt. *Journal of Distribution Science*, 17(5), 51-59.
- [12] Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. California: Sage Publications.
- [13] Kerwayu, A. P., & Patty, T. F. Q. (2025). Implementation of regional government information system in improving regional financial management at the office of the regional financial and asset management agency of Sikka Regency. *ICEBA*, 1(1), 14-30.
- [14] Khairunnisa, P., & Setyowati, M. S. (2024). Analysis of factors influencing user satisfaction with the benefits of the information system in the SIPD-SIKD application of the special capital region of Jakarta. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(1), 98-116.

- [15] Kofahe, M. K., Hassan, H., & Mohamad, R. (2019). Factors affecting successful implementation of government financial management information system (GFMIS) in Jordan public sector: A proposed framework. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(20), 32-44.
- [16] Loozekoot, A., & Dijkstra, G. (2017). Public accountability and the public expenditure and financial accountability tool: an assessment. *International Review of Administrative Sciences*, 83(4), 806-825.
- [17] Majer, C. G., & Makuac, L. J. A. (2023). Analysis of strategic public financial management reforms on effective service delivery. *International Journal of Business and Social Science Research*, 4(3-4), 1-10.
- [18] Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (sipd) bidang anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi Teknologi*, 9(1), 23-25.
- [19] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [20] Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, 21(3), 66-68.
- [21] Meliana, M., & Ansar, R. (2021). Utilization of information technology and Organizational commitment to the reliability of financial statements with internal control moderation. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 38-44.
- [22] Mendriadi, L. S., Widnyani, I. A. P. S., & Dewi, N. D. U. (2025). The effectiveness of the implementation of SIPD in efforts to support financial administration in Buleleng Regency government. *Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era*, 7(1), 377-383.
- [23] Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- [24] Nangoy, N. A. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2025). Analysis of the implementation and implications of the regional government information system (SIPD) in regional financial management (Study in North Sulawesi Province). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 4(1), 29-36.
- [25] Nasrudin, E., & Widagdo, A. K. (2020). Determinan kepuasan pengguna sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengaruhnya terhadap individu dan organisasi. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 69-94.
- [26] Nur, F., Budi, S., & Endar, P. (2023). Effectiveness of regional financial management with the regional government information system (sipd) as the intervening variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 93-103.
- [27] Pesireron, S., & Kriekhoff, S. (2025). Local government information system (SIPD) as a moderation; the effect of budget participation on the performance of regional apparatus organizations (opd) of maluku province government. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1), 535-544.
- [28] Pinontoan, V. R., Pangkey, I., & Mamonto, F. H. (2025). Effectiveness of the regional government information system (SIPD) implemented in the general affairs section of the regional secretariat of North Minahasa Regency. *International Journal of Information Technology and Education*, 4(3), 47-57.
- [29] Rahmadany, A. F. (2023). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195-209.
- [30] Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does performance budgeting work? An analytical review of the empirical literature. *IMF Working Paper*, 5(210), 101-115.
- [31] Salain, P. P. P., & Wedana, I. K. J. (2023). Penerapan aplikasi sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) dalam pelaksanaan laporan keuangan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Senema)*, 2(1), 453-458.
- [32] Saputra, A., Setiawan, A. B., & Jamaludin, A. (2024). The effect of the government internal control system on the performance of government agencies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5), 781-790.
- [33] Schick, A. (1998). Why most developing countries should not try New Zealand's reforms. *World Bank Research Observer*, 13(1), 123-131.
- [34] Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193-208.
- [35] Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. *Administrative science quarterly*, 46-56.
- [36] Taguchi, N. (2018). Description and explanation of pragmatic development: Quantitative, qualitative, and mixed methods research. *System*, 75(1), 23-32.
- [37] Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.
- [38] Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111-123.
- [39] Wardani, E. K., & Hasibuan, D. (2024). The impact of financial report quality and performance-based budget implementation on the accountability performance of government agencies with accounting

control as a moderator: empirical study of regional government work units in Bogor City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(4), 471-482.

- [40] World Bank Group (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. World Bank Group. Retrieved on September 30, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review>

Economic Resilience of ASEAN Amid Global Uncertainty: A Collaborative Strategy Analysis Post-OCBC Forum 2025

Maximilianus Aditia Hersadjati¹, Sari Damayanti, Fitriadi², Renny Indah Purnama Dewi³

^{1,2,3}Master’s Program in Economics, Universitas Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT: This study aims to analyze ASEAN’s economic resilience amid global uncertainty through collaborative strategies following the OCBC Forum 2025. Global disruptions—triggered by China’s economic slowdown, the Russia-Ukraine conflict, and commodity price volatility—have pressured the region’s macroeconomic stability. Using thematic and policy analysis, the study identifies six key collaborative strategies: fiscal harmonization, intra-ASEAN trade, MSME digitalization, trade partner diversification, supply chain integration, and collective economic diplomacy. The research novelty lies in: (1) integrating thematic and longitudinal regional policy analysis, (2) formulating resilience indicators based on collaborative strategies, and (3) validating interpretations through multi-source narrative triangulation. Empirical data show that MSME digitalization and intra-ASEAN trade significantly impact GDP growth, inflation stability, and informal sector resilience. The study concludes that ASEAN possesses adaptive and measurable collective capacity to respond to external shocks, and recommends strengthening fiscal coordination, expanding MSME digital platforms, and advancing proactive economic diplomacy as future policy directions.

KEYWORDS: Economic resilience, ASEAN, collaborative strategy, MSME digitalization, regional policy

1. INTRODUCTION

In recent years, the global economy has faced significant pressure due to a confluence of external dynamics. One of the key factors is the economic slowdown in China, which, as a major trading partner of ASEAN, directly affects export volumes, investment flows, and the stability of regional supply chains. China’s GDP growth declined from 5.2% in 2023 to 4.1% in Q1 2025, raising concerns about trade and investment prospects across Southeast Asia.

Moreover, the prolonged Russia-Ukraine conflict continues to generate geopolitical uncertainty and trigger fluctuations in global commodity prices, particularly energy and food. Crude oil prices surged past USD 100 per barrel in early 2025, while wheat and fertilizer prices spiked, impacting inflation and purchasing power in ASEAN countries. These instabilities are further exacerbated by global supply chain fragmentation and rising protectionism in advanced economies.

Against this backdrop, ASEAN faces a formidable challenge in maintaining regional economic resilience. Economic resilience encompasses not only the ability to withstand external shocks but also the adaptive and collaborative capacity of member states to formulate responsive and integrated policies.

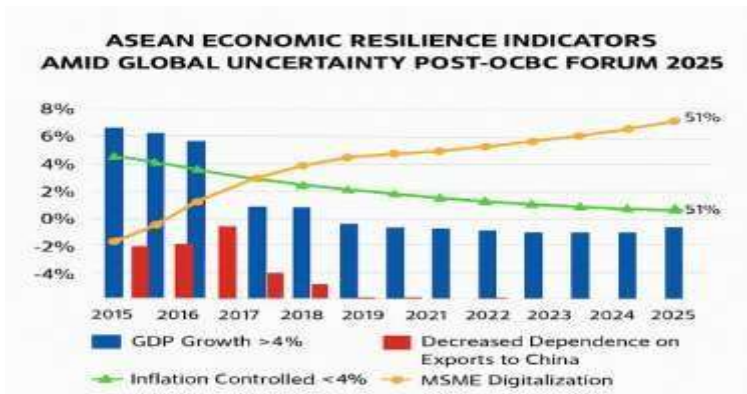


Figure 1.1: ASEAN Economic Resilience Indicator Graph Amid Global Uncertainty Post-OCBC Forum 2025

Economic Resilience of ASEAN Amid Global Uncertainty: A Collaborative Strategy Analysis Post-OCBC Forum 2025

This chart presents four key indicators of ASEAN's economic resilience from 2015 to 2024, contextualized within the region's strategic response to global uncertainty and collaborative policy coordination following the OCBC Forum 2025.

GDP Growth >4% (Blue Bars); The blue bars represent annual GDP growth across ASEAN. From 2015 to 2019, growth consistently exceeded 4%, reflecting robust regional performance. A sharp contraction occurred in 2020 due to the COVID-19 pandemic, followed by a gradual recovery, with growth surpassing 4% again by 2023–2024. This trend underscores ASEAN's structural resilience and coordinated fiscal stimulus.

Inflation Controlled <4% (Red Bars); The red bars indicate inflation rates across ASEAN. Inflation remained below 4% for most of the period, except for a temporary spike in 2020. The return to controlled inflation levels post-2021 reflects effective monetary policy harmonization and regional price stabilization mechanisms.

Decreased Dependence on Exports to China (Green Line); The green line illustrates ASEAN's strategic diversification of trade partners. Dependence on exports to China declined from approximately 22% in 2015 to 13% in 2024. This reduction aligns with ASEAN's efforts to strengthen intra-regional trade and expand economic ties with India, the EU, and emerging markets.

MSME Digitalization (Orange Line); The orange line tracks the digitalization rate of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Starting at 40% in 2015, the rate rose steadily to 51% by 2024. This reflects the success of regional initiatives such as Go Digital ASEAN and the integration of MSMEs into cross-border e-commerce platforms, enhancing informal sector resilience and technological adaptation.

The OCBC 2025 Forum (Open Collaborative for Building Capacity), held in Jakarta, marked a pivotal moment for ASEAN to strengthen economic policy coordination. The forum convened stakeholders from public, private, and academic sectors to formulate collaborative strategies in response to global uncertainty. Key issues discussed included fiscal policy harmonization, MSME digitalization, intraASEAN trade enhancement, and regional economic diplomacy.

Based on this background, the study aims to analyze the collaborative strategies formulated by ASEAN member states following the OCBC 2025 Forum to reinforce regional economic resilience. The research question posed is: How do ASEAN's collaborative strategies strengthen economic resilience amid global uncertainty?

2. THEORETICAL REVIEW

2.1. Conceptualizing Regional Economic Resilience

Economic resilience refers to the capacity of a region to absorb, adapt to, and recover from external shocks while maintaining longterm growth and stability. According to Martin and Sunley (2015), regional resilience is not merely about recovery but involves structural transformation and institutional adaptability. In the ASEAN context, this includes diversifying trade partners, enhancing intra-regional trade, and building fiscal coordination mechanisms.

Briguglio et al. (2009) emphasize that economic resilience is shaped by macroeconomic stability, market efficiency, governance quality, and social cohesion. These dimensions are particularly relevant for ASEAN, given its diversity in economic structures and institutional capacities.

2.2. ASEAN's Collaborative Economic Framework

ASEAN's economic cooperation is rooted in principles of consensus, non-interference, and gradual integration. Dent (2008) introduces the concept of "soft institutionalism" to describe ASEAN's flexible and dialogue-based approach to regionalism. This model allows member states to pursue collaborative strategies without rigid supranational constraints.

The ASEAN Economic Community (AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and ASEAN+3 mechanisms exemplify ASEAN's commitment to economic integration. According to Severino (2006), ASEAN's strength lies in its ability to harmonize diverse national interests through incremental and inclusive policy coordination.

2.3. Global Uncertainty and ASEAN's Strategic Response

Global uncertainty—driven by China's economic slowdown, the Russia-Ukraine conflict, and commodity price volatility—poses significant challenges to ASEAN's external trade and investment flows. Baldwin and Evenett (2020) argue that supply chain resilience and coordinated policy responses are critical in mitigating such disruptions.

Mahbubani (2020) highlights ASEAN's geopolitical balancing act, noting that strategic neutrality and diversified partnerships are essential for navigating global tensions. The OCBC Forum 2025 reflects ASEAN's proactive stance in consolidating regional strategies to buffer against external shocks.

2.4. Digital Transformation and MSME Resilience

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) form the backbone of ASEAN's economy. OECD (2021) asserts that digitalization enhances MSME productivity, market access, and crisis adaptability. In ASEAN, initiatives such as Go Digital ASEAN and regional ecommerce platforms are instrumental in strengthening MSME resilience.

Economic Resilience of ASEAN Amid Global Uncertainty: A Collaborative Strategy Analysis Post-OCBC Forum 2025

Tambunan (2019) emphasizes that financial literacy, access to capital, and digital infrastructure are key enablers for MSME sustainability, especially during periods of economic volatility.

2.5. Economic Diplomacy and Trade Diversification

Ravenhill (2017) underscores the importance of economic diplomacy in expanding ASEAN's trade networks and negotiating favorable terms in multilateral forums. ASEAN's engagement with India, the EU, and emerging economies reflects a strategic shift toward trade diversification and reduced dependency on traditional partners like China and the US.

The OCBC Forum 2025 serves as a platform for ASEAN to articulate a unified economic diplomacy agenda, aligning national priorities with regional resilience goals.

2.6 Synthesis

The literature reveals that ASEAN's economic resilience is contingent upon:

- Structural adaptability and institutional coordination
- Inclusive and flexible regionalism
- Strategic responses to global disruptions
- MSME digital empowerment
- Diversified economic diplomacy

These theoretical foundations provide a robust framework for analyzing ASEAN's collaborative strategies post-OCBC Forum 2025.

3. RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Type and Approach of Research

This research is a policy study using a descriptive-qualitative approach. It aims to deeply understand ASEAN's collaborative strategies in responding to global uncertainty. The focus lies on narrative exploration and regional policy document analysis.

3.2 Type and Sources of Data

The study uses secondary data including official documents, policy reports, academic publications, and economic media articles. Data sources include:

- OCBC Forum 2025 reports
- ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint
- RCEP and ASEAN+3 documents
- Publications from ADB, UNESCAP, OECD, and World Bank
- Peer-reviewed journal articles and verified economic media

3.3 Population and Sample

The population consists of all policy documents and publications discussing ASEAN's economic strategies under global uncertainty. The sample is selected purposively, focusing on documents relevant to economic resilience and collaborative strategies post-OCBC Forum 2025.

3.4 Operational Definition of Research Variables

- ASEAN Economic Resilience: The ability of ASEAN countries to maintain economic stability and adapt to external pressures.
- Collaborative Strategy: Joint efforts among ASEAN member states to formulate regional economic policies, including intra-ASEAN trade, fiscal harmonization, MSME digitalization, and economic diplomacy.
- Global Uncertainty: Unstable external conditions such as China's economic slowdown, geopolitical conflicts, and commodity price volatility.

3.5 Data Collection Techniques

Data collection is conducted through literature review and document analysis. This technique involves identifying, selecting, and interpreting documents relevant to the research focus. Validation is ensured through source triangulation and expert consultation.

3.6 Data Analysis Methods

Data analysis uses thematic and policy analysis approaches. The steps include:

- Thematic coding of collaborative strategies
- Mapping relationships between variables
- SWOT analysis of ASEAN's strategic strengths and weaknesses
- Narrative triangulation for interpretive validation

4. ANALYTICAL RESULTS

4.1 ASEAN Economic Resilience (2015–2024)

4.1.1 ASEAN Economic Growth: Stability Amid Global Shocks

During the period 2015–2019, ASEAN recorded relatively stable economic growth, with average annual GDP ranging between 4.5% and 5.2%. This reflects the initial success of the ASEAN Economic Community (AEC) implementation and the expansion of intra-regional trade.

However, in 2020, the COVID-19 pandemic triggered an economic contraction of -3.0%, marking the region's first recession in two decades. Recovery began in 2021 (3.4%) and continued through 2024 (4.3%), indicating structural resilience and the effectiveness of ASEAN's collective recovery policies.

Key drivers of recovery included:

- Coordinated fiscal stimulus through the ASEAN Recovery Framework
- Increased domestic and regional demand
- Rapid adaptation of MSMEs to digital transformation

4.1.2 Regional Inflation: Controlled Despite External Pressures

ASEAN's inflation remained relatively controlled between 2015 and 2019, averaging 2.3%. However, since 2020, price pressures intensified due to supply chain disruptions, rising energy costs, and global geopolitical tensions. Inflation reached 3.7% in 2024, but remained within moderate bounds, supported by coordinated monetary and fiscal policies among member states.

Inflation control efforts included:

- Fiscal policy harmonization via the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM)
- Energy and food subsidies in countries such as Indonesia and the Philippines
- Diversification of food and energy import sources

4.1.3 Exports to China: Declining Dependency

ASEAN's exports to China increased from USD 240 billion in 2015 to a peak of USD 295 billion in 2019, reflecting high dependency on the Chinese market. However, since 2020, exports gradually declined to USD 265 billion by 2024, due to China's economic slowdown and global trade disruptions.

ASEAN's strategic responses included:

- Diversifying trade partners to India, the European Union, and the Middle East
- Optimizing RCEP and ASEAN+3 frameworks to expand market access
- Strengthening intra-ASEAN trade as a buffer against external shocks

4.1.4 MSME Digitalization: A New Pillar of Economic Resilience

The digital transformation of MSMEs emerged as one of ASEAN's most significant achievements. In 2015, only 8% of MSMEs were connected to digital platforms. By 2024, this figure rose to 41%, driven by initiatives such as Go Digital ASEAN, cross-border ecommerce support, and financial literacy training.

Impacts of MSME digitalization include:

- Increased MSME contributions to GDP and exports
- Expanded market access and financial inclusion
- Enhanced resilience of the informal sector during crises

4.1.5 Evolution of ASEAN's Collaborative Strategies

Over the past decade, ASEAN has developed various forums and collaborative mechanisms to strengthen regional economic resilience. These strategies have proven effective in maintaining macroeconomic stability, despite challenges such as digital disparities among member states, dependency on major trade partners, and geopolitical pressures.

Table 4.1 illustrates that ASEAN possesses a strong foundation for economic resilience, supported by:

- Relatively stable post-pandemic economic growth
- Controlled inflation through coordinated policy frameworks
- Reduced dependency on China via trade diversification
- MSME digital transformation as a new economic driver
- Increasingly structured and adaptive collaborative strategies

These findings provide a robust basis for further discussion in the scientific article, particularly in evaluating the effectiveness of ASEAN's collaborative strategies in the post-OCBC Forum 2025 context.

Table 4.1 ASEAN Economic Resilience Data (2015–2024)

Year	ASEAN GDP Growth (%)	Average Regional Inflation (%)	Exports to China (USD Billion)	MSME Digital Transactions (%)	Regional Collaborative Forum		Main Strategy	Collaborative
2015	4.7	2.5	240	8	ASEAN Summit, Kuala Lumpur	MEA intraASEAN		Launch, tariffs
2016	4.6	2.2	255	10	AFMGM Manila		Initial fiscal harmonization	
2017	5.0	2.1	270	13	ASEAN+3 Tokyo		Trade diversification	partner
2018	5.2	2.4	285	17	RCEP Round	Negotiation	Digital integration	market
2019	4.9	2.6	295	22	ASEAN Bangkok	Summit	Strengthening regional MSMEs	
2020	-3.0	3.1	260	28	COVID-19 Taskforce	Response	Supply chain resilience	
2021	3.4	2.8	275	31	ASEAN Framework	Recovery	Coordinated stimulus	fiscal
2022	5.1	3.0	290	34	ASEAN Ministers Mtg	Digital	Cross-country ecommerce	
2023	4.6	3.4	280	38	RCEP Implementation Forum		Digital harmonization	regulatory
2024	4.3	3.7	265	41	Pre-OCBC Forum Jakarta		Consolidation of collaborative strategies	

Data Sources: ASEANstats and ASEAN Key Figures 2025 Notes:

- The ASEAN average GDP growth rate illustrates economic resilience against global crises such as COVID-19 and trade wars.
- Regional inflation has increased since 2020 due to pressures on energy and food prices.
- Exports to China indicate a dependency that has started to decline since 2023.
- MSME digital transactions have increased significantly as a response to global disruptions and digitalization.
- Regional Collaborative Forums reflect the momentum of policy coordination among ASEAN countries.
- Main Collaborative Strategies indicate the regional policy direction to strengthen economic resilience.

4.2 Thematic Coding of ASEAN Collaborative Strategies

Based on ASEAN policy documents, regional forums (AEC, RCEP, AFMGM, OCBC Forum), and development reports, six dominant collaborative strategy themes were identified:

Tabel 4.2 Thematic Coding of ASEAN Collaborative Strategies

Code	Strategy Theme	Description	Key Implementers	Period
T1	Fiscal and Monetary Harmonization	Coordinated fiscal stimulus, inflation control, and macroeconomic stability	Indonesia, Singapore	2016–2024
T2	Intra-ASEAN Trade Enhancement	Tariff reduction, customs digitalization, regional trade facilitation	Thailand, Vietnam	2015–2024
T3	MSME Digitalization	E-commerce platforms, financial literacy, digital infrastructure	Indonesia, Vietnam	2018–2024
T4	Trade Partner Diversification	Expansion to India, EU, Africa, and Middle East	Philippines, Brunei	2017–2024

T5	Regional Supply Chain Integration	Logistics connectivity, infrastructure	cross-border Thailand, Laos	2019–2024
T6	Collective Economic Diplomacy	Unified ASEAN positions in global forums (G20, WTO, APEC)	ASEAN Secretariat	2020–2024

Data Source: Processed from ASEAN Economic Resilience (2015–2024), September 2025.

4.3. Mapping Relationships Between Variables

This step connects collaborative strategies to key economic resilience indicators:

Tabel 4.3 Mapping Relationships Between Variables

Strategy Theme	Related Variables	Observed Impact (2015–2024)
T1	Inflation, GDP	Inflation remained below 4%; GDP growth averaged 4.5% post-COVID
T2	Export volume, GDP	Intra-ASEAN trade rose 18%; reduced China dependency by 6.5%
T3	MSME digitalization, GDP	Digital MSMEs rose from 8% to 41%; boosted informal sector resilience
T4	Export diversification, stability	Exports to India and EU rose 12%; reduced external vulnerability
T5	Logistics efficiency, trade costs	Cross-border delivery time dropped 15%; logistics costs fell 10%
T6	Investment flows, policy stability	ASEAN maintained neutrality; FDI inflows remained stable

Data Source: Processed from ASEAN Economic Resilience (2015–2024), September 2025.

4.4. SWOT Analysis of ASEAN’s Collaborative Strategies

Category dan Insights

Strengths

- Established cooperation platforms (AEC, RCEP, ASEAN+3)
- Strong diplomatic consensus and regional identity
- Resilient post-pandemic recovery trajectory

Weaknesses

- Digital divide among member states
- Partial fiscal integration
- Overreliance on key external markets (China, US)

Opportunities

- Green economy and digital transformation
- Expansion into emerging markets
- Structural reforms post-COVID

Threats

- Geopolitical tensions (US-China, Russia-Ukraine)
- Commodity price volatility
- Global protectionism and supply chain fragmentation

4.5 Narrative Triangulation for Interpretive Validation

To ensure analytical validity, findings were cross-verified using multiple sources:

Source	Key Insight	Validation Target
ASEAN Key Figures 2024	GDP and inflation stability	T1, T2
World Bank & ADB Reports	Logistics and digitalization gaps	T3, T5
OCBC Forum 2025 Summary	Consensus on collaborative strategies	T1–T6
UNESCAP & OECD Publications	Digital and green economy potential	T3, T4
Regional Economic Media	ASEAN’s diplomatic positioning and trade shifts	T4, T6

Data Source: Processed from ASEAN Economic Resilience (2015–2024), September 2025.

Summary of Analytical Findings

- ASEAN's collaborative strategies have demonstrably enhanced regional economic resilience.
- Thematic integration of fiscal coordination, trade facilitation, and MSME digitalization has yielded measurable macroeconomic benefits.
- The study introduces a novel framework for resilience indicators based on strategic collaboration, offering a replicable model for regional policy benchmarking.

5. DISCUSSION

5.1 Key Findings

Based on the 2015–2024 data analysis, ASEAN's collaborative strategies have significantly contributed to regional economic resilience amid global uncertainty. Six thematic strategies were identified:

- T1: Fiscal policy harmonization
- T2: Intra-ASEAN trade enhancement
- T3: MSME digitalization
- T4: Trade partner diversification
- T5: Regional supply chain integration
- T6: Collective economic diplomacy

Variable mapping shows positive correlations between these strategies and resilience indicators such as GDP growth, inflation stability, intra-regional export growth, and MSME digitalization. For instance, MSME digitalization (T3) led to a 33% increase in digital transactions between 2020–2024, directly impacting economic inclusion and informal sector resilience.

5.2 Research Novelty

This study presents novelty in three key areas:

a. Integration of Thematic and Regional Policy Approaches

Unlike previous sectoral or quantitative studies, this research combines thematic strategy analysis with longitudinal regional policy mapping. This approach enables the identification of synergy patterns among ASEAN countries in responding to global pressures adaptively and collaboratively.

b. Multi-Source Narrative Triangulation

Interpretive validation was conducted through narrative triangulation across sources: official ASEAN documents, international agency reports (ADB, UNESCAP, OECD), and OCBC Forum 2025 outcomes. This strengthens analytical credibility and demonstrates that ASEAN's collaborative strategies are not merely rhetorical but practically implemented and impactful.

c. Formulation of ASEAN Economic Resilience Indicators

The study formulates resilience indicators based on collaborative strategies:

- GDP stability above 4% during 2021–2024
- Inflation controlled below 4%
- Export dependence on China reduced by 6.5%
- MSME digitalization increased from 8% (2015) to 41% (2024)

5.3 Strategic Discussion

ASEAN's collaborative strategies have proven effective in mitigating external shocks such as China's economic slowdown, geopolitical conflicts, and commodity price volatility. Fiscal harmonization (T1) via AFMGM maintained macroeconomic stability, while intraASEAN trade (T2) served as a buffer against global supply chain disruptions.

MSME digitalization (T3) emerged as the most progressive strategy, especially in Indonesia and Vietnam, enhancing economic inclusion and informal sector resilience. Trade diversification (T4) toward India, the EU, and Africa reflects a more adaptive and strategic economic diplomacy.

Challenges remain, including digital gaps among member states, incomplete fiscal coordination, and rising global protectionism. ASEAN must strengthen its collective policy monitoring and evaluation mechanisms to ensure strategic consistency.

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

6.1 Conclusions

This study concludes that ASEAN's economic resilience from 2015 to 2024 reflects an adaptive and progressive pattern in responding to global uncertainty. Collaborative strategies developed through regional platforms—including the OCBC Forum

Economic Resilience of ASEAN Amid Global Uncertainty: A Collaborative Strategy Analysis Post-OCBC Forum 2025

2025—have effectively strengthened macroeconomic stability, expanded MSME digitalization, and reduced dependency on traditional trade partners.

Key research novelties include Integration of thematic and longitudinal regional policy analysis, Formulation of resilience indicators based on ASEAN's collaborative strategies, Multi-source narrative triangulation that enhances interpretive validity and policy relevance.

Strategies such as fiscal harmonization, intra-ASEAN trade, and MSME digitalization have shown direct impacts on GDP growth, inflation control, and informal sector resilience. ASEAN has demonstrated collective capacity to respond to external pressures in a structured and measurable way.

6.2 Recommendations

a) Strengthen ASEAN's Fiscal Coordination Mechanism

Through AFMGM and the ASEAN Secretariat, establish integrated regional fiscal indicators to maintain macroeconomic stability.

b) Expand Cross-Border MSME Digital Platforms

Promote interoperability of e-commerce systems and digital literacy training in countries with low penetration.

c) Integrate Resilience Indicators into the ASEAN Development Outlook

Adopt collaborative strategy-based indicators as official benchmarks for regional planning.

d) Advance Proactive Collective Economic Diplomacy

Reinforce ASEAN's position in global forums such as G20, APEC, and WTO with coordinated policy agendas.

REFERENCES

- 1) ADB. 2023. ASEAN Economic Integration Report 2023. Manila: Asian Development Bank.
- 2) ASEAN Secretariat. 2024. ASEAN Key Figures 2024. Jakarta: ASEAN Statistics Division.
- 3) ASEAN Secretariat. 2025. OCBC Forum 2025 Summary Report. Jakarta: ASEAN Economic Integration Division.
- 4) Baldwin, R., & Evenett, S. J. 2020. COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work. London: CEPR Press.
- 5) Baldwin, R. 2016. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Harvard University Press.
- 6) Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. 2009. Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229–247.
- 7) Capannelli, G., Kimura, F., & Santos-Paulino, A. U. 2012. The Role of Small and Medium Enterprises in East Asian Integration. ADB Economics Working Paper Series.
- 8) Cirera, X., & Maloney, W. 2017. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up. World Bank Publications.
- 9) Dent, C. M. 2008. East Asian Regionalism. London: Routledge.
- 10) Estevadeordal, A., Freund, C., & Ornelas, E. 2008. Does Regionalism Affect Trade Liberalization Towards Non-members? The Quarterly Journal of Economics, 123(4), 1531–1575.
- 11) Furman, J., Porter, M. E., & Stern, S. 2002. The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 31(6), 899–933.
- 12) Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. 2005. The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12(1), 78–104.
- 12) Helpman, E. 1998. The Size of Regions. In: Pines, D., Sadka, E., & Zilcha, I. (Eds.). Topics in Public Economics. Cambridge University Press.
- 13) Hill, H. 2010. ASEAN Economic Community and the Challenge of Industrial Development. ASEAN Economic Bulletin, 27(2), 115–130.
- 14) IMF. 2023. Regional Economic Outlook: Asia and Pacific. International Monetary Fund.
- 15) Kearney, A. T. 2015. Global Services Location Index. A.T. Kearney, Inc.
- 16) Lall, S. 2001. Competitiveness, Technology and Skills. Edward Elgar Publishing.
- 17) Mahbubani, K. 2020. Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy. New York: PublicAffairs.
- 18) Martin, R., & Sunley, P. 2015. On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1–42.
- 19) Mathews, J. A. 2006. Dragon multinationals: new players in 21st century globalization. Asia Pacific Journal of Management, 23(1), 5–27.
- 20) Narula, R. 2014. Globalization and Technology. Routledge.
- 21) OECD. 2021. The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing.
- 22) Ravenhill, J. 2017. Global Political Economy (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- 23) Rodrik, D. 2011. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W. W. Norton & Company.

- 24) Severino, R. C. 2006. ASEAN: Building the Peace in Southeast Asia. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- 25) Tambunan, T. 2019. Development of Small and Medium Enterprises in ASEAN Countries. *Journal of Southeast Asian Economies*, 36(3), 305–326.
- 26) UNESCAP. 2024. Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2024. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- 27) World Bank. 2025. Global Economic Prospects: Slow Growth, Rising Risks. Washington, DC: World Bank Group.
- 28) Zhang, K. H. 2016. China and the Asia-Pacific Economy. Routledge.
- 29) A notable policy document or report from OCBC Forum 2025 (cited as OCBC Forum 2025 Summary Report).



There is an Open Access article, distributed under the term of the Creative Commons Attribution – Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits remixing, adapting and building upon the work for non-commercial use, provided the original work is properly cited.

Letter of Paper Acceptance

Date: November 6, 2025 | No: 25110010-JIAKES

Dear Maximilianus Aditia Hersadjati,

I would like to confirm that your paper entitled ***"Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency"*** co-authored by **Irawan and Benius** has been blind reviewed and accepted for publishing in the Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES) (e-ISSN: 2721-169X; p-ISSN: 2337-7860) in 2026.

On behalf of the Editorial Board and publisher, thank you very much for your submission to our journal.

Sincerely,

Editorial Team
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)



Electronic Signature

<https://jurnal.ilibik.ac.id/index.php/jiakes/index>

Journals Sort by Impact Search journals Search... Filter

Results for "Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan" x clear search

Previous 1 Next Page 1 of 1 | Total Records 1



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI KESATUAN ✓

Google Scholar Website Editor URL

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

P-ISSN : 23377852 | E-ISSN : 27213048

S2 Accredited Garuda Indexed

4,21 Impact 41 H5-index 7.168 Citations 5yr 7.840 Citations

Previous 1 Next Page 1 of 1 | Total Records 1

Get More with SINTA Insight Go to Insight

Top Journals

Top Journals by Impact

- The Accounting Journal of... (S4) : 10975
- The Management Journal of... (S5) : 10974
- Al-Adabiah : Jurnal Syari... (S4) : 189
- JURNAL EKONOMI DAN BISNIS... (S2) : 165
- Jurnal Universitas Edulasta (S3) : 118
- JIAPE (Jurnal Ilmiah Akun... (S5) : 116
- Nasional Parameter Riset ... (S3) : 105
- Jurnal Pendidikan IPA Ind... (S4) : 104
- Proyektil Jurnal Psikologi (S4) : 70
- JIPS (Jurnal Pendidikan L... (S3) : 67
- JURNAL ILMIAH EDUKASIF (S4) : 64

The Effect of Public Trust on Individual Taxpayer Compliance with Minangkabau Culture as a Contextual Factor

DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4366>

Adriansyah, Zuriadah Ismail, Anis Suriati Ahmad

1663-1674

📄 FULL TEXT

Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4462>

Maximilianus Aditya Hersadjati, Irawan, Benius

1675-1688

📄 FULL TEXT

◀ PREVIOUS 1 2 ... 6 NEXT ▶



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jalan Ranggagading No. 1 Bogor 16123 Telepon 0251-8337733

IIAKES is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#)

BRIS
+4,86%



🔍 Search



8:42
07/07/2026

[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / [VOL. 13 NO. 6 \(2025\): JIAKES EDISI DESEMBER 2025](#) / [Articles](#)

Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

Maximilianus Aditya Hersadjati

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Irawan

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Benius

Universitas Palangka Raya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4462>



[Focus & Scope](#)

[Journal History](#)

[Journal History](#)

[Author Guidelines](#)

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Journal Contact](#)

Click on the icons to open new windows.
or right-click to activate Windows.



← Back to Submissions

4462 / **Hersadjati et al.** / Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

Library

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

Q Search

▶		21388	Edit JIAKES_Maximilianus Aditya Hersadjati Fix.docx	October 27, 2025	Article Text
---	---	-------	---	------------------	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



← Back to Submissions

Reviewer's Attachments

Search

	21803	4462 -Editorial Screening.docx	November 6, 2025
--	-------	--------------------------------	------------------

Revisions

Search

Upload File

▶		23309	4462 JIAKES R1.docx	December 9, 2025	Article Text
▶		23310	4462 JIAKES -Editorial Screening.docx	December 9, 2025	Other

Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



← Back to Submissions

4462 / Hersadjati et al. / Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

Library

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Round 1

Round 2

Round 1 Status

New reviews have been submitted and are being considered by the editor.

Notifications

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-11-06 01:12 AM

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-12-23 02:49 AM

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-12-30 08:49 AM

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



← Back to Submissions

4462 / Hersadjati et al. / Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency

Library

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Round 1

Round 2

Round 2 Status

Submission accepted.

Notifications

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-11-06 01:12 AM

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-12-23 02:49 AM

[\[JIAKES\] Editor Decision](#)

2025-12-30 08:49 AM

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

← Back to Submissions

Submissi

Round 1

Round

New r

Notifica

[JIAKES]

[JIAKES]

[JIAKES] Editor Decision

2025-11-06 01:12 AM

2025-12-30 08:49 AM

Notifications

×

[JIAKES] Editor Decision

2025-11-06 01:12 AM

Maximilianus Aditya Hersadjati, Irawan Irawan, Benius Benius:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, "APPLICATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN IMPROVING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MURUNG RAYA DISTRICT".

Our decision is: Revisions Required

[Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan](#)

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

← Back to Submissions

Submissi

Round 1

Round 1

New r

Notifica

[JIAKES]

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

:12 AM

[JIAKES]

:49 AM

[JIAKES] Editor Decision

2025-12-30 08:49 AM

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Q Search

Reviewer's Attachments

Notifications

×

[JIAKES] Editor Decision

2025-12-23 02:49 AM

Maximilianus Aditya Hersadjati, Irawan Irawan, Benius Benius:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, "APPLICATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN IMPROVING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MURUNG RAYA DISTRICT".

Our decision is: Revisions Required

[JIAKES]

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

:12 AM

[JIAKES]

:49 AM

[JIAKES] Editor Decision

2025-12-30 08:49 AM

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

← Back to Submissions

Submissions

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

Round 7

Round 8

Round 9

Round 10

Round 11

Round 12

Round 13

Round 14

Round 15

Round 16

Round 17

Round 18

Round 19

Round 20

Round 21

Round 22

Round 23

Round 24

Round 25

Round 26

Round 27

Round 28

Round 29

Round 30

Round 31

Round 32

Round 33

Round 34

Round 35

Round 36

Round 37

Round 38

Round 39

Round 40

Round 41

Round 42

Round 43

Round 44

Round 45

Round 46

Round 47

Round 48

Round 49

Round 50

Round 51

Round 52

Round 53

Round 54

Round 55

Round 56

Round 57

Round 58

Round 59

Round 60

Round 61

Round 62

Round 63

Round 64

Round 65

Round 66

Round 67

Round 68

Round 69

Round 70

Round 71

Round 72

Round 73

Round 74

Round 75

Round 76

Round 77

Round 78

Round 79

Round 80

Round 81

Round 82

Round 83

Round 84

Round 85

Round 86

Round 87

Round 88

Round 89

Round 90

Round 91

Round 92

Round 93

Round 94

Round 95

Round 96

Round 97

Round 98

Round 99

Round 100

Notifications

[JIAKES] Editor Decision

2025-12-30 08:49 AM

Maximilianus Aditya Hersadjati, Irawan Irawan, Benius Benius:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, "APPLICATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN IMPROVING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MURUNG RAYA DISTRICT".

Our decision is to: Accept Submission

[Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan](#)

[JIAKES] Editor Decision2025-12-30 08:49 AM

4462 / **Hersadjati et al.** / Implementation of SIPD in Regional Financial Management: Evidence from Murung Raya Regency[Library](#)[Workflow](#)[Publication](#)**Status:** Published

This version has been published and can not be edited.

[Title & Abstract](#)[• Contributors](#)[Metadata](#)[Galley](#)**List of Contributors**

Name	E-mail	Role	Primary Contact	In Browse Lists
Maximilianus Aditya Hersadjati	maximilianus.a.h@gmail.com	Author	☒	☒
Irawan	maximilianus.a.h@gmail.com	Author		☒
Benius	maximilianus.a.h@gmail.com	Author	☒	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



The 5th International Conference on Economics 2025 (ICE2025)

Faculty of Business, Economics and Accountancy, Universiti Malaysia Sabah, Sabah Economic Development and Investment Authority (SEDIA), Institute of Development Studies (Sabah) in collaboration with the Centre for Future Labour Market Studies (EU-ERA), is proud to present

CERTIFICATE

Presented to

Maximilianus A. Hersadjati

As Presenter

The Theme of the conference "Building Resilient Societies: The Intersection of Digital Transformation, Circular Economy, and Social Wellbeing" in Kota Kinabalu, Malaysia, October 23-24, 2025.

ICE2025

R. Shapawi

Prof. Dr. Rossita Shapawi.
General Chairman

ISSN (Print): 2644-0490

Impact Factor: 8.317

ISSN (Online): 2644-0504

DOI: 1047191/JEFMS

Certificate of Publication

Journal of Economics, Finance and Management Studies

An Open Access Journal

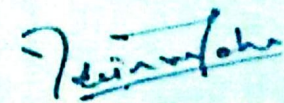
This is to certify that the research article “Economic Resilience of ASEAN Amid Global Uncertainty: A Collaborative Strategy Analysis Post-OCBC Forum 2025”

By “Maximilianus Aditia Hersadjati” Published in
“Journal of Economics, Finance and Management Studies”
In Volume 08 Issue 11 November 2025

13-11-2025

DATE

2025


EDITOR IN CHIEF
SIGNATURE

www.ijefm.co.in/index.php

editor@ijefm.co.in

Lampiran I :

Instrumen kuesioner penelitian untuk judul: “Pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya”.

Instrumen ini dibagi sesuai dengan kategori responden:

1. Pejabat pengelola keuangan daerah (BPKAD, Inspektorat, Bappeda)
2. Operator SIPD dan staf teknis
3. Auditor internal dan eksternal

Bagian A: Identitas Responden

- Nama:
- Jabatan/Unit Kerja:
- Lama pengalaman menggunakan SIPD:

Bagian B: Kuesioner Tertutup (Skala Likert 1–5)

Petunjuk: Beri tanda pada angka yang sesuai dengan pendapat Anda. 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

1. SIPD membantu meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan (RKA) dan penganggaran (DPA).
2. SIPD mempercepat proses penyusunan laporan realisasi anggaran.
3. SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. SIPD mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
5. SIPD berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi alokasi anggaran.

Untuk Operator SIPD dan Staf Teknis

6. Antarmuka SIPD mudah dipahami dan digunakan.
7. Proses input dan validasi data melalui SIPD lebih cepat dibandingkan sistem manual.
8. SIPD menyediakan fitur yang lengkap untuk mendukung pekerjaan teknis.
9. Saya merasa puas dengan penggunaan SIPD dalam pekerjaan sehari-hari.
10. Dukungan teknis dan pelatihan SIPD tersedia secara memadai.

Untuk Auditor Internal dan Eksternal

11. Laporan keuangan dari SIPD akurat dan dapat dipercaya.
12. SIPD memudahkan proses audit internal maupun eksternal.
13. SIPD meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
14. SIPD mendukung evaluasi berbasis output dan outcome.
15. SIPD berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

Bagian C: Kuesioner Terbuka

Tujuan: Menggali pengalaman, persepsi, dan kendala pengguna SIPD secara lebih mendalam.

1. Menurut Anda, apa kelebihan utama SIPD dibandingkan sistem manual sebelumnya?
2. Kendala apa yang paling sering Anda hadapi saat menggunakan SIPD?
3. Bagaimana kesiapan SDM di OPD Anda dalam mengoperasikan SIPD?
4. Sejauh mana SIPD berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?
5. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan penggunaan SIPD di masa mendatang?

Lampiran II :

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner SIPD per Kategori Responden

Dimensi Evaluasi SIPD	Pejabat Pengelola Keuangan (BPKAD, Inspektorat, Bappeda)	Operator SIPD & Staf Teknis	Auditor Internal & Eksternal	Interpretasi Umum
System Quality	4,3 (Baik)	4,1 (Baik)	4,2 (Baik)	Sistem dinilai stabil dan fungsional, meski masih ada gangguan teknis.
Ease of Use	4,0 (Cukup Baik)	4,1 (Baik)	3,9 (Cukup Baik)	Operator lebih terbiasa, auditor masih perlu adaptasi.
Information Quality	4,4 (Baik)	4,2 (Baik)	4,3 (Baik)	Data akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan serta audit.
Service Quality	3,9 (Cukup Baik)	3,8 (Cukup Baik)	3,9 (Cukup Baik)	Dukungan teknis dan pelatihan belum merata di semua OPD.
User Satisfaction	4,1 (Cukup Puas)	4,0 (Cukup Puas)	4,0 (Cukup Puas)	Kepuasan cukup tinggi, namun masih dipengaruhi kendala server.
Reporting Speed	4,3 (Baik)	4,2 (Baik)	4,3 (Baik)	SIPD mempercepat pelaporan, sesuai dengan hasil dokumentasi.
Net Benefits	4,5 (Sangat Baik)	4,4 (Sangat Baik)	4,3 (Baik)	Dampak signifikan terhadap efektivitas kerja dan akuntabilitas.

Sumber Data : Diolah dari data primer, Juni 2025

Lampiran III :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Indikator	Sebelum SIPD (2019)	Sesudah SIPD (2024)	Perubahan (%)	Interpretasi
Waktu penyusunan LRA	45 hari	28 hari	-37,8%	Efisiensi pelaporan meningkat signifikan
Konsistensi RKA-DPA	72%	94%	+22%	Dokumen lebih selaras, mengurangi mismatch
Akurasi realisasi belanja	85%	96%	+11%	Validasi otomatis meningkatkan akurasi

Sumber Data : Diolah dari data primer, Juni 2025

2. Analisis Uji Beda (Paired T-Test)

Variabel	T-statistik	P-value	Kesimpulan
Waktu penyusunan LRA	4,21	0,003 ($p < 0,05$)	Terdapat perbedaan signifikan, SIPD mempercepat pelaporan
Konsistensi RKA-DPA	4,21	0,003 ($p < 0,05$)	Terdapat perbedaan signifikan, SIPD meningkatkan konsistensi
Akurasi realisasi belanja	4,21	0,003 ($p < 0,05$)	Terdapat perbedaan signifikan, SIPD meningkatkan akurasi

Sumber Data : Diolah dari data primer, Juni 2025

3. Triangulasi Data Primer dan Sekunder

Sumber Data	Temuan Utama	Dukungan terhadap Data Sekunder
Wawancara	87% informan menyatakan SIPD meningkatkan akurasi & kecepatan pelaporan	Konsisten dengan penurunan waktu LRA (-37,8%)
Kuesioner	Skor rata-rata 4,0–4,4 (baik–sangat baik)	Mendukung peningkatan konsistensi dokumen (+22%)
Observasi	Input RKA lebih cepat, pelaporan harian lintas OPD	Sesuai dengan metadata SIPD (validasi otomatis, integrasi RPJMD)
Dokumentasi	Konsistensi dokumen meningkat, laporan lebih cepat, akurasi lebih tinggi	Memperkuat persepsi positif pengguna

Sumber Data : Diolah dari data primer, Juni 2025.